



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA PALU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PASANGKAYU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN DONGGALA**

TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 21 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
- Pemohon: Isran Noor dan Hadi Mulyadi

PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palu Tahun 2024
- Pemohon: Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate

PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024
- Pemohon: Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok

PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024
- Pemohon: Putrawan Suryatno dan Aprisal

PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024
- Pemohon: Moh. Yasin dan Syafiah

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 08.07 – 11.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nallom Kurniawan
Irfan Nur Rachman
Siska Yosephin Sirait
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Jaidun
2. Raden Viola Reininda Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Ikbal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin
2. Andi Fairuz Fakhriyah R Makkuaseng

D. Pemohon Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Putrawan Suryatno

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adam
2. Ahmad Hidayat

F. Termohon:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Ramaon Dearnov Saragih | (KPU Prov. Kalimantan Timur) |
| 3. Iskandar Lembah | (KPU Kota Palu) |
| 4. Syahrudin | (KPU Kab. Pasangkayu) |
| 5. Jan Hery Pakan | (KPU Kab. Toraja Utara) |
| 6. Nurbia | (KPU Kab. Donggala) |

G. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. M. Ali Fernandez | (KPU Prov. Kalimantan Timur) |
| 2. Julianer Aditia Warman | (KPU Kota Palu) |
| 3. Arman | (KPU Kab. Toraja Utara) |
| 4. Irfan Idham | (KPU Kab. Pasangkayu) |
| 5. M. Wijaya S. | (KPU Kab. Donggala) |

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Muhammad Faisal
2. Agus Amri

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Andi Syukri Syachrir
2. Muhammad Anzar

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mangatta Toding Allo
2. Abner Buntang

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Misbahuddin Gasma
2. Mursik

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nasruddin
2. Arena Jaya Rahmat Parampasi

M. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Danny Bunga | (Provinsi Kalimantan Timur) |
| 2. Daini Rahmat | (Provinsi Kalimantan Timur) |
| 3. Agussalim Wahid | (Kota Palu) |
| 4. Ferdiansyah | (Kota Palu) |
| 5. Brikken Linde Bonting | (Kab. Toraja Utara) |
| 6. Bonnie Freedom | (Kab. Toraja Utara) |
| 7. Harlywood Suly Junior | (Kab. Pasangkayu) |
| 8. Arham Syah | (Kab. Pasangkayu) |
| 9. Abdul Salim | (Kab. Donggala) |
| 10. Minhar | (Kab. Donggala) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 145, 162, 262, 72, dan 35/PHPU, Wali Kota, Bupati, dan Gubernur Tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, kemudian pengesahan bukti tambahan atau bukti yang baru diajukan, ya, dengan ada catatan-catatan nanti.

Kemudian yang berikutnya akan saya sampaikan hasil dari persidangan ini, akan kita laporkan ke RPH dan akan diputus dalam RPH bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Yang disampaikan pokok-pokoknya saja sambil saya pandu bersama kita bertiga, supaya lebih efisien karena apa yang dibutuhkan oleh Hakim untuk memutus itu kita sudah ... apa ... bisa ... bisa meraba, ya. Meraba, tapi secara halus, penuh kasih sayang merabanya.

Baik. Kita mulai dulu untuk memanggil, ini tadi laporan Pemohon Perkara 145 belum hadir, ya? Belum, ya? Masih ... masih di jalan? Ya, nanti segera suruh masuk, ya.

Pemohon 142 ... eh, 162? Hadir, ya. Kemudian Pemohon 262?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:05]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Baik. Kemudian Pemohon 72? Hadir? Baik. Kemudian Pemohon 35?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:16]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Baik. Nah, sekarang yang main pada pagi hari ini adalah Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. KPU Kota Palu? Hadir, ya. KPU Kabupaten Donggala?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S. [02:34]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Baik, kemudian KPU Kalimantan Timur?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [02:38]

Selamat pagi, Yang Mulia, hadir.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Hadir. Kemudian KPU Kabupaten Pasangkayu?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:44]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]

Baik. Yang terakhir untuk KPU Kabupa ... KPU Kabupaten Toraja Utara?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:51]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Baik. Kemudian Pihak Terkait 145?
Pihak Terkait 162?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [03:00]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01]

Baik. Kemudian Pihak Terkait 262?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [03:05]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06]

Baik. Kemudian Pihak Terkait 72?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [03:09]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Kemudian yang terakhir Pihak Terkait 35?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO [03:13]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

Baik, terima kasih. Bawaslu ini, sekarang Bawaslu Kota Palu?

22. BAWASLU: FERDIANSYAH [03:21]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]

Baik. Kabupaten Donggala?

24. BAWASLU: MINHAR [03:26]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Baik. Kemudian Bawaslu Kalimantan Timur?

26. BAWASLU: DANNY BUNGA [03:30]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31]

Baik. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu?

28. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [03:35]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Yang terakhir, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara?

30. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [03:39]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Belakang, ya. Baik, sudah semua.

Sekarang kita mulai untuk mendengarkan jawaban Termohon dari KPU Kota Palu atau Kuasanya. Saya persilakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [03:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Oke, sebentar. Pemohon 145 silakan datang, mana? Sudah? Oh, sudah datang? Ya, terlambat?

34. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [04:02]

Ya, Yang Mulia. Macet, tadi.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]

Dari mana? Oh, kalau macet biasa, cuman Hakim saja yang enggak pernah macet.

Ya, kita mulai 145.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat pagi. Yang terhormat, Ketua beserta Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya mungkin langsung saja, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Ya. Sistematisnya ada Eksepsi?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:34]

Ada, Yang Mulia. Ada Eksepsi.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Eksepsinya bagaimana?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:37]

Ya. Pertama, Yang Mulia. Ada Eksepsi soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41]

Mahkamah tidak berwenang?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:42]

Ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:43]

Kemudian, ada Kedudukan Hukum Pemohon.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Kedudukan Hukum.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:46]

Ya. Dan yang terakhir ada obscur libel.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Ya. Apa itu? Intinya saja.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [04:51]

Ya, intinya, Yang Mulia. Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Ada 2 hal dalam ... dalam Permohonan Pemohon, Yang Mulia, ada 2 soal. Ada pertama, pelanggaran Pasal 71 soal pelantikan, Yang Mulia. Kemudian yang kedua itu, penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Itu bukan merupakan kewenangan?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:09]

Ya. Bukan merupakan (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Ya sudah, dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:12]

Ya, baik.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:12]

Terus berikutnya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:12]

Kemudian langsung, Yang Mulia. Di ... karena dianggap dibacakan, langsung lanjut ke Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Ya, Legal Standing.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:21]

Ya. Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya mengakui bahwa jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil Kota Palu Tahun 2024 berjumlah 380 (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:32]

Ya, enggak usah dibacakan keseluruhan (...)

58. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:33]

Oh. Oke, baik.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]

Enggak punya Legal Standing, karena tidak memenuhi ambang batas (...)

60. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:37]

Tidak ... ya, tidak memenuhi ambang batas, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

158.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:39]

Ya. Karena perbedaannya, Yang Mulia. Dia berkisar, Yang Mulia, 37,71%, Yang Mulia atau sebanyak 63.775 (...)

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:49]

30 ... 3 per ... 37 berapa?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:51]

37,71%, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:54]

71%. Padahal menurut Ketentuan 158 (...)

65. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:56]

Ya (...)

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:57]

Berapa mestinya?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:58]

1,5 %, Yang Mulia (...)

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:59]

Hanya 1,5% (...)

69. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [05:59]

Atau 2.537, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Oke. Terus, habis itu apa lagi?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:05]

Ya. Kemudian, Yang Mulia. Terkait permo ... terkait obscur libel, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:09]

Permohonan kabur?

73. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:10]

Ya.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

Ya.

75. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:11]

Kabur, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:12]

Ya.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:13]

Ya, karena posita angka 2, Yang Mulia. Pada pokoknya, meminta agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan KPU.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Oke.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:23]

Ya. Namun di sisi lain, dalam Posita Permohonan a quo tidak ada menguraikan terkait alasan diskualifikasi, baik rekomendasi Bawaslu atau rekomendasi pembatalan calon (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Oke.

81. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:32]

Dan putusan pengadilan. Kemudian (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Itu di Eksepsi?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:34]

Ya. Di Eksepsi, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Sekarang pokok?

85. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:37]

Oke, Yang Mulia. Pokok, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:39]

Apa saja?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:40]

Yang inti-intinya, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]

Ya, inti-intinya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:43]

Ya. Bahwa Yang Mulia, terkait angka 5, Yang Mulia. Halaman 20, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:51]

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [06:52]

Ya.

Permohonan a quo dalam pok ... dalam IV. Pokok Permohonan pada huruf D, poin 1 Angka 1.16 sampai 1.45 karena faktanya adalah bahwa sepanjang petahana mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pelantikan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum ditetapkannya petahana sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September Tahun 2024 oleh Termohon, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, maka tentunya tindakan tersebut telah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2), Yang Mulia (...)

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Jadi (...)

93. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:18]

Dianggap dibacakan.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Dalam mutasi, ada izin?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:22]

Ya.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:23]

Ada izinnya dibukti berapa, itu?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:27]

Buktinya, Yang Mulia, di T ... T-6, T-7, T-8, T-9, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

T-6, T-7 (...)

99. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:34]

T-8, T-9, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:36]

9. Itu berapa ... anu ... berapa orang?

101. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:37]

Ada, izin, Yang Mulia, sekitar 165.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]

165.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:43]

Ya. 165-167.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]

Itu batas waktunya 22 Maret, ya, kan?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:49]

Ya.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:51]

Tapi izinnya, keluarnya kapan, itu?

107. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:53]

Keluarnya 29 April, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

29 April.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [07:57]

Ya, 29 April.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Izinnya kemudian jauh, ya?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:00]

26 April, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:01]

Oh, 26 April.

113. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:02]

Izinnya, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Nanti Pihak Terkait juga, apa benar ini?
Kemudian, Bawaslu, benar enggak ini, ya?
Ini karena perusahaan anu ... mengenai persoalan krusial.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:14]

Ya.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:14]

Kalau sampai melanggar ini, kan konsekuensinya bisa didiskualifikasi, kan?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:19]

Baik, Yang Mulia.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:20]

Makanya ini krusial, harus dijawab secara presisi.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:24]

Ya.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:24]

Ya. Jadi, keluar izin 26 Maret (...)

121. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:29]

26 April, Yang Mulia.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:30]

April. Jadi, sudah satu bulan, baru keluar izinnya?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:35]

26 April, Yang Mulia. Jadi, kami, Yang Mulia, dari Termohon, Yang Mulia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]

He em.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:41]

Pada dasarnya itu, ada tanggapan masyarakat di tanggal 18.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:44]

He em.

127. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:45]

Termohon itu kan tidak mengetahui. Setelah ada tanggapan masyarakat, nah kemudian dilakukanlah (...)

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:50]

Oh, Termohon itu enggak tahu?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:52]

Ya, ya. Dilakukanlah klarifikasi, Yang Mulia. Yang pada pokoknya (...)

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Jadi, Termohon itu enggak tahu kalau ada Pasal 71?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [08:58]

Tidak ... bukan ... bukan soal Pasal 71, soal pelantikan.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:02]

Oh, pelantikannya yang enggak tahu?

133. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:04]

Ya, nanti ada tanggapan masyarakat, baru kemudian diklarifikasi (...)

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:06]

Baru tahu?

135. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:06]

Baru diketahui.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]

Oke. Oh, begitu, ya.

137. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:10]

Ya. Kemudian, Yang Mulia, dalam syarat calon maupun syarat pencalonan, Yang Mulia. Tidak disyaratkan soal pelantikan, Yang Mulia. Sehingga, ad ... sehingga dilakukanlah penetapan pasangan calon, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]

Sudah terlanjur dilakukan penetapan?

139. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:25]

Ya, ya, baru kemudian diklarifikasi. Setelah diklarifikasi, Yang Mulia, ternyata ada ... faktanya ada izin, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Oke.

141. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:32]

Ya. Itu yang (...)

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:34]

Setelah diklarifikasi, ada izin?

143. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:36]

Ada izin dan (...)

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:37]

Itu waktu penetapan itu, tanggal berapa di sana?

145. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:40]

21.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:42]

21 apa?

147. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:44]

21 September.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:46]

September. Setelah itu, sudah ada izin?

149. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:48]

Ada izin setelah dilakukan klarifikasi (...)

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]

Izinnya yang Maret tadi ... yang April?

151. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:52]

Ya.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:53]

Oke. Terus, apa lagi?

153. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [09:54]

Terus, saya langsung ... ada tanggapan masyarakat. Saya sudah jelaskan tadi, Yang Mulia.

Kemudian, ada juga laporan, Yang Mulia, di Bawaslu Kota Palu, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:03]

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [10:04]

Ada laporan di Bawaslu Kota Palu, yang kemudian pada pokoknya, Yang Mulia, tidak memenuhi unsur ... tidak dilanjut laporan tersebut, Yang Mulia, laporan atas pelantikan yang dilakukan (...)

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:15]

Laporannya dianggap tidak ada masalah?

157. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [10:16]

Ya.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Oke, nanti Bawaslu, ya, merespons itu.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [10:20]

Ya, siap.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Yang, "Ya," itu Bawaslu-nya.
Terus, KPU, apa lagi?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [10:26]

Oke, yang ... lanjut, Yang Mulia. Soal yang kedua, Yang Mulia.
Terkait penghalangan hak konstitusional, Yang Mulia.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

He em.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [10:23]

Ya, pada dasarnya, Yang Mulia, KPU telah melakukan sosialisasi,
Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Ya.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [10:40]

Sosialisasi terkait hari H, terkait punggut hitung, Yang Mulia. Ada
beberapa sosialisasi, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, untuk menjaga hak konstitusional warga
Kota Palu, Yang Mulia, Termohon kemudian melakukan Coklit, ada
tahapan, Yang Mulia, dari DP4, kemudian DP (...)

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:01]

Ya, anu (...)

167. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:01]

Sehingga (...)

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Mohon ... mohon maaf, *Yang Mulia*-nya jangan kebanyakan.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:05]

Siap.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:05]

Enggak enak, risih saya rasanya.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:06]

Siap, ya.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:08]

Saya biasanya hanya dipanggil, "Prof." Ini kalau, "Yang Mulia," terus, risih rasanya.

173. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:11]

Siap, baik, baik. Dilakukan sosialisasi, Yang Mulia.
Kemudian, dilakukan ada tahapan Coklit, Yang Mulia, dari DP4.
Kemudian (...)

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:19]

Kebiasaannya itu, "Yang Mulia," terus itu.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:22]

Ya, siap. Menjadi DPS, kemudian meningkat menjadi DPT.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]

Nanti jangan keliru, “Yang Maha Mulia,” nanti kacau nanti.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:29]

Baik. Jadi, itulah merupakan wujud-wujud daripada menjaga hak konstitusional warga masyarakat Kota Palu.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:36]

Ya.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:37]

Ya.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:38]

Itu yang karena ada dalil yang diti ... dinilai tingkat partisipasinya rendah, ya?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:43]

Ya, itu ada dalil (...)

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]

Itu tingkat partisipasinya berapa persen sih?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:46]

6 (...)

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:47]

DPT-nya berapa di sana?

185. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:47]

62% ... 62,5%.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:52]

DP- nya berapa?

187. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [11:54]

DPT-nya 300 ... oh, tidak, 171.446.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]

171 lebih.

189. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:04]

Ya.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:04]

Kemudian, yang mencoplas berapa? Yang menggunakan hak pilih?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:07]

Yang menggunakan hak pilih=169.145.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:13]

169?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:15]

Ya.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:15]

Yang enggak menggunakan hak pilih hanya 2.000 lebih, kan? Sedikit, kan?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:20]

Ya, tidak menggun ... ya.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]

Ha?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:21]

Ya.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:22]

Kalau gitu (...)

199. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:24]

100 tidak ... tidak memilih=102.847.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:29]

102.000?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:30]

Ya, yang tidak memilih.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Lho, enggak. Sekarang saya ulangi, DPT-nya berapa? 171?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:35]

171.446.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Yang menggunakan hak pilih?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:41]

Yang menggunakan hak pilih=100 ... 169.145.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:51]

Oh, kan banyak berarti?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:52]

Yang menggunakan hak pilih.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:53]

Mendekati anu toh ... 171 dengan 169, deket itu. Bener KPU?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [12:59]

Ya. Kemudian (...)

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:00]

KPU-nya yang tahu ini, coba KPU-nya.
Kalau begitu, tingkat partisipasinya hampir 90% lebih ini?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:07]

6 ... 62% koma ... 62,5%.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:12]

Lho, lha, ya. Kalau angkanya, DPT-nya=171 lebih.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:16]

Ya.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17]

171.000 lebih.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:19]

Ya.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]

Yang menggunakan hak pilih berapa?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:23]

169.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:24]

169, berarti (...)

219. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:26]

145.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]

Berapa itu? Hanya yang guna ... yang menggunakan hak pilih hanya 2.301. Lha, kalau gitu tingkat partisipasinya 90% lebih, kan?

221. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:42]

Baik.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Ha?

223. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:43]

Baik.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Tadi kan, 60%.

225. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:46]

Tolak ukur (...)

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]

Ini yang salah, yang mana?

227. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:47]

Tolak ukur di DPT, Yang Mulia.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:49]

Ha?

229. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:49]

Tolak ukur di ini ... di DPT.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Lho, lha, ya, kan?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [13:56]

Ya, benar.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:58]

Yang enggak menggunakan hak pilih=2.300. Diukur dari DPT-nya=171, lho kan, hampir 70% ... eh, 90% lebih, kan?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [14:08]

Baik.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:09]

Ya?

235. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [14:10]

Ya.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:11]

Ya. Ya, nanti anu lha ... belajar hitung-hitung dulu.

Ya. Terus, yang lain lagi? Apa lagi? Jadi tingkat partisipasinya tidak rendah, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, ya? Ya?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [14:30]

Ya.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]

Oke. Terus, apa lagi?

239. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [14:33]

Oh, mohon ... mohon maaf, Yang Mulia. DPT=274.293.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]

Lha, itu.

241. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [14:42]

Kemudian pemilih, yang mem ... pemilih=100.000 ... 171.446.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:50]

Ya.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [14:51]

Yang tidak memilih 102.847.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:54]

Lha, kalau gitu baru ketemu, ya, kan? Itu gampang banget, kok. Ya, terus apa lagi?

245. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:03]

Nah, pada dasarnya, Yang Mulia. Dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, Yang Mulia, sejak tahun 2010, 2015, sampai 2020, Yang Mulia, jumlah pemilih persentase, Yang Mulia, di wilayah Kota Palu, Yang Mulia, sebesar 60%.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:19]

Oke. Berarti ada stab ... stabil, ya (...)

247. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:22]

Ya.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Diangka 60%, ya?

249. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:22]

Ya, memang segitu, Yang Mulia.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:24]

Waktu Pileg kemarin berapa? Pilpres? Enggak, ingat?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:28]

Enggak inget.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:28]

Ya, sudah, ndak usah dijawab.
Ya. Terus, apa lagi?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:34]

Nah. Kemudian, Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia, melalui KPPS, telah memberitahukan ... telah memberikan Formulir C.Pemberitahuan, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:45]

Enggak. Ya, kalau ini kan, sudah selesai persoalannya.

255. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:47]

Ya, siap.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Berarti C-6, juga sudah dibagikan, ya, kan?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:30]

Sudah, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:51]

Dila ... sudah dilakukan C apa ... sosialisasi. Tingkat partisipasi itu stabil diangka 60% lebih.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [15:58]

60%.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:59]

Ya, sudah apa lagi yang mau dijelaskan? Ini dua dalil Pemohon ini, kalau tidak salah, ya?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [16:05]

Ya. Terakhir, Yang Mulia. Tidak ada ... sebagaimana soal ... tidak ada pernah ... tidak pernah ada rekomendasi untuk PSU.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:12]

Tidak ada (...)

263. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [16:13]

Soal (...)

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:13]

Rekomendasi PSU.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [16:14]

Pilwa ... Pemilihan Wali Kota, Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:16]

Ya, baik.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [16:17]

Sehingga tidak pernah dilakukan PSU.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Oke, terus?

269. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [16:20]

Terima kasih.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:22]

Petitumnya, sekarang dibaca.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [16:23]

Petitum, Yang Mulia.
Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 ter ... bertanggal 5 Desember 2024.
3. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
4. Kemudian menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:07]

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [17:07]

Nomor Urut 1, Dr. Hidayat M.S.I., an ... dan Andi Nur Lamakarate=43.391 suara.

Nomor Urut 2, H. Hadianto Rasyid, S.E., dan Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P.=107.166 suara.

Nomor Urut 3, H. Muhammad J. Wartabone, S.M., dan Dr. Rizal S.Pd.I., M.Pd.=18.588 suara.

Total suara sah=169.145 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:48]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait 145, dipersilakan.

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [17:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:01]

Walaikumsalam.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:01]

Kami dari Kuasa, dari Pihak Terkait pasangan calon wak ... wali kota dan wakil wali kota, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2004 Nomor Urut 2, Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin, dari Kantor Law Firm Idham Chalid.

Yang Mulia, dalam keterangan Pihak Terkait ini, kami ajukan juga Eksepsi.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:29]

Ya.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:29]

Menyangkut tentang (...)

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]

Anu ... apa yang disampaikan (...)

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:31]

Eksepsi, terhadap masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Sebentar, saya potong (...)

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:33]

Dianggap dibacakan.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:35]

Saya potong sebentar.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:36]

Ya.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]

Apakah yang disampaikan oleh Pihak Termohon itu, menurut Saudara ada benarnya? Yang disampaikan Termohon, tadi. Sebagian besar, sama?

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:51]

Sebagian besar sama, Yang Mulia.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:52]

Apa yang sama? Yang tidak sama saja yang disampaikan.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [18:56]

Yang sama itu adalah menyangkut tentang persetujuan dari Mendagri, tentang pelantikan itu.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:03]

Sebelum di Eksepsinya (...)

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:05]

Ya.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:05]

Eksepsinya dulu.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:06]

Di Eksepsi ini, menyangkut tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:10]

Ya.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:12]

Itu dianggap dibacakan.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:12]

Ya. Tidak berwenang?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:13]

Tidak berwenang.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:14]

Terus, tidak memenuhi ambang batas?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:16]

Ya, tidak memenuhi ambang batas.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:19]

Ini betul selisihnya 37% itu, ya?

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:21]

Ya. Benar, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:23]

Oke. Terus, apa lagi?

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:23]

Kemudian, tidak memiliki ... Pemohon tidak memiliki Legal Standing, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:28]

Ya. Tidak ada LS, karena tidak memenuhi ambang batas.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:31]

Tidak memenuhi ambang batas.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Ya. Terus, ada lagi Eksepsinya?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:37]

Cuma itu, Yang Mulia, Eksepsinya.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]

Oh. Enggak, kaburnya enggak ikut-ikut?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:40]

Enggak, enggak, enggak, enggak kabur, ya. Enggak kabur.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:44]

Kalau menurut Saudara, Permohonan Pemohon enggak apa-apa, ya?

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:46]

Ya.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:46]

Enggak kabur, toh?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:47]

Ya, enggak kabur.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:48]

Kalau Termohon bilang kabur. Terus, pokok (...)

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:52]

Kemudian, dalam Pokok Perkara.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:53]

Pokok Perkara.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:54]

Ya. Yang Pokok Perkara ini, menyangkut tentang Pasal 71 tadi, Yang Mulia.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:58]

Ya, mutasi.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [19:58]

Ya, mutasi.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:59]

Ada izin, ya?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:00]

Ya?

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Ada izin, kan?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:02]

Ya, ada izin.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]

Izinnya di bukti PT berapa?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:05]

Di ... izinnya ini kami tidak lampirkan di ... di Permohonan kami ... di Keterangan kami, Yang Mulia, karena ada pada Pihak Termohon.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]

Oh, jadi anu ...mestinya kan Anda punya izin.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:17]

Ya.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:18]

Yang punya izin, kan Saudara sebetulnya.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:20]

Ya.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:20]

Ya, tapi enggak?

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:22]

Tapi itu izin itu di pelantikan yang kedua, Yang Mulia. Yang pelantikan pertama, kan tidak ada ... tidak ada izin.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Ya.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:30]

Ya, he eh.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:31]

Jadi, betul itu yang disampaikan tadi oleh Termohon?

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:34]

Ya, ada izin, tapi di pelantikan yang keduanya, Yang Mulia.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:38]

Pelantikan keduanya kapan itu?

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:44]

Ya. Yang pelantikan pertama itu kan tanggal ini, Yang Mulia, tanggal 22 Maret, pertama.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:50]

22 Maret?

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:51]

Ya.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Itu pelantikan pertama. Terus?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [20:53]

Ya. Kemudian, pelantikan itu dibatalkan oleh Pihak Terkait pada tanggal 29 Maret.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:03]

29 Maret dibatalkan.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [21:05]

Ya, karena ada surat dari Mendagri (...)

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [21:09]

Ya, yang tidak memberikan izin.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:12]

Tidak boleh?

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [21:12]

Ya, tidak boleh, jadi dibatalkan.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Terus?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [21:14]

Tetapi pelantikan tanggal 20 ... 22 ... 22 Maret itu, Yang Mulia, itu belum dilengkapi dokumen-dokumen pelantikan.

Yang pertama, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan, yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian, belum dilengkapi juga surat pernyataan pelantikan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah, Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional (...)

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:09]

Jadi, sebetulnya dari situ, kesimpulannya belum dilantik betul?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:15]

Belum dilantik betul, Yang Mulia. Belum dilantik betul, Yang Mulia.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:17]

Oke, ya.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:18]

Jadi, pengangkatan pejabat pada tanggal 21 Maret 2024 dan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemkot Kota Palu oleh Wali Kota Palu tersebut, belum memenuhi dasar legalitas untuk dapat dikualifikasi (...)

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:34]

Ya, sudah. Sudah bisa dimengerti.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:35]

Ya, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:38]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oke, Yang Mulia. Ya, saya kira itu.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:40]

Terus?

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:41]

Ya, Yang Mulia?

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:42]

Terus, gimana? Akhirnya meminta izin?

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:45]

Akhirnya terakhir minta izin, Yang Mulia.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:46]

Oke.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:47]

Kemudian, keluarlah surat izin itu.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:49]

Setelah surat izin itu keluar, baru dilantik betul?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:52]

Dilantik ... ya, lantik betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:53]

Oke.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:54]

He eh, ya.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:55]

Ya. Terus, apa lagi?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [22:59]

Itu, Yang Mulia, menyangkut tentang Pasal 71.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]

Ya.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [23:02]

Kemudian, menyangkut Permohonan ... dalil Permohonan Pemohon pada bagian 4, pokok Permohonan huruf d, angka 2.5 sampai dengan angka 2.7, halaman 24 sampai dengan 2 ... halaman 27, itu kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:19]

Ya.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [23:20]

Ya.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:20]

Terus, apa lagi?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [23:21]

Itu saja, Yang Mulia.
Kemudian, untuk Petitumnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Silakan.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:27]

Ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [23:28]

Izin, Yang Mulia.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:29]

Silakan.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [23:29]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:31]

Walaikumsalam.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [23:32]

Dalam Eksepsi terkait ini.
Menjatuhkan ... pertama, menjatuhkan Eksepsi Pihak Terkait.
Dalam pokok perkara.
Memoho ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:57]

Ya, itu, Pak Muhammad Anzar, sudah kelihatan di TV, ada namanya itu.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [24:00]

Oh, terima kasih, Yang Mulia.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:02]

Sudah bisa terlihat dari Palu itu.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [24:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut, Yang Mulia. Atau apabila ... saya lanjutkan kembali tadi.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:13]

Oh, agak grogi.

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [24:16]

Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:17]

Terus, Pak Anzar.

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANZAR [24:18]

Lanjut, Yang Mulia.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ... seadil adilnya.
Hormat kami Kuasa Hukum Kantor Law Firm Idham Chalid, Andi Syukri Syachrir, Muhammad Anzar, Rusmin H. Hamzah, Idrus Djafar, dan M. Fajrin. Sekian, Yang Mulia.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:42]

Terima kasih.
Sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu ada resumanya? Tidak (...)

391. BAWASLU: FERDIANSYAH [24:52]

Ada, Yang Mulia.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:53]

Ada. Resumanya berapa halaman?

393. BAWASLU: FERDIANSYAH [24:54]

10 halaman, Yang Mulia.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:55]

Kebanyakan itu. Ini yang penting hanya anu saja ... yang perlu kita anu ... ketahui.

395. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:01]

Siap, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]

Ada persoalan enggak mengenai mutasi itu? Ada temuan enggak?

397. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:06]

Baik, izin, Yang Mulia. Terkait dengan ... kami paparkan, laporan ini ada total yang berkaitan dengan Pokok Permohonan, ada (...)

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:18]

Ya, sekarang gini supaya sistematis, saya tanya aja.

399. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:21]

Siap.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:23]

Ada berapa laporan?

401. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:24]

Ada 140 laporan.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:26]

140 laporan. Dari 140 laporan yang memenuhi persyaratan formil materiil berapa?

403. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:34]

Ada 2, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:37]

2 saja?

405. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:38]

Ya. Diregis (...)

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:39]

Terus ada tindak lanjut dari itu yang sudah memenuhi, setelah dilakukan pendalaman, penelitian?

407. BAWASLU: FERDIANSYAH [25:47]

Bahwa terkait dengan perkara yang tadi disebutkan, pelanggaran pelantikan, bahwa ini dari pleno kami memutuskan (...)

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:00]

Ya.

409. BAWASLU: FERDIANSYAH [26:00]

Bahwa tidak memenuhi unsur-unsur (...)

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:01]

Oh, tidak (...)

411. BAWASLU: FERDIANSYAH [26:03]

Pelanggaran.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:03]

Memenuhi unsur-unsur?

413. BAWASLU: FERDIANSYAH [26:04]

Ya. Kedua (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]

Kenapa tidak memenuhi unsur-unsur?

415. BAWASLU: FERDIANSYAH [26:08]

Dalam hal ini sesuai dengan kajian kami, Yang Mulia, termasuk dari pemaparan sebelumnya, histori, termasuk yang kami tarik juga dari salah satu yurisprudensi dari perkara putusan PT TUN Makassar, bahwa terkait dengan pencalonan ini berhubungan dengan syarat calon dan pencalonan. Nah, sementara pelapor ini ... ter ... menyampaikan pelanggaran ... apa ... dalam kajian kami ini terkait dengan melanggar ... bahwa mereka menetapkan penetapannya, melanggar penetapannya. Nah, penetapan itu dalam kajian kami terkait dengan ... bukan di Pasal 71, tapi itu terkait dengan pembatalan. Kalau untuk Pasal 71 ... kalau terkait dengan penetapan ini hubungannya dengan syarat calon dan pencalonan.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:22]

Oke. Jadi tidak memenuhi anu ... ya ... setelah dilakukan kajian?

417. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:28]

Benar, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:29]

Tidak ada apa ... anu ... ada rekomendasi apa-apa?

419. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:31]

Ya, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:32]

Dan memang betul itu, akhirnya memang ada izin dari Kemendagri?

421. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:36]

Benar, Yang Mulia.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:37]

Oke.

423. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:37]

Itu juga sesuai dengan yang kami klarifikasi.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:39]

Oke. Terus yang satunya apa?

425. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:44]

Perkara 1 Register Nomor 003 terkait dengan adanya BA yang sama.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:51]

Oke.

427. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:52]

Terkait ... dalam hal rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota Palu.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:56]

Oke.

429. BAWASLU: FERDIANSYAH [27:56]

Bahwa kami ini sudah meneruskan rekomendasi kepada KPU Kota Palu. Bahwa dalam rekomendasi kami, terdapat pelanggaran administrasi pemilihan.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:07]

Oke. Terus yang laporan itu, dua itu saja? Yang lain-lain enggak ada, toh?

431. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:15]

Ya, yang lain (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

140 dari 138 (...)

433. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:19]

Ya.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]

Tidak memenuhi persyaratan, kan?

435. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:21]

Ya. Untuk yang sekitar 78 laporan di kota dan 60 laporan di kecamatan, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:28]

Ya.

437. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:29]

Ini sesuai dengan kajian awal, tidak memenuhi formil dan/atau materiil.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:36]

Oke, ya. Sudah cukup, itu.

439. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:38]

Siap.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:38]

Ada temuan?

441. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:40]

Temuan ada, Yang Mulia. Namun (...)

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:42]

Apa temuannya?

443. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:42]

Ada tiga temuan. Namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:47]

Oke. Apa lagi, yang mau disampaikan?

445. BAWASLU: FERDIANSYAH [28:51]

Ya. Izin, Yang Mulia. Di luar dari tadi, terkait dengan laporan dugaan pelanggaran hak konstitusional yang sekitar 104 ... maaf 140 laporan, kami juga melakukan upaya penelusuran di 7 kecamatan.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:09]

Ya.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:09]

Dan hasil penelusuran kami, melalui Bukti Form A (LHP). Bahwa dari 7 kecamatan tersebut, penelusurannya tidak terdapat dugaan pelanggaran.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:21]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

449. BAWASLU: FERDIANSYAH [29:24]

Cukup, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:24]

Cukup, ya. Baik, itu saja sebetulnya yang kita butuhkan. Tapi kita yang lain bisa membaca. Anda mengaj ... sudah menyampaikan ... anu ... toh, laporan lengkap, kan?

451. BAWASLU: FERDIANSYAH [29:37]

Se ... benar, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia (...)

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:38]

Ya. Keterangan lengkap, ya? Sudah, ya?

453. BAWASLU: FERDIANSYAH [29:39]

Ya.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:39]

Baik, terima kasih.

455. BAWASLU: FERDIANSYAH [29:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:43]

Sekarang Prof. Enny, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Sudah cukup? Baik. Prof. ... Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Ya.

Baik, sudah cukup. Saya yang terakhir mau mengesahkan bukti. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-36. Ya, betul?

457. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [30:01]

Ya, benar-benar.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:03]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-4?

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SYUKRI SYACHRIR [30:07]

Benar, Yang Mulia.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:07]

Ya.

Kemudian, Bawaslu PK-28.13-1 sampai dengan PK-28-13.351?

461. BAWASLU: FERDIANSYAH [30:18]

Benar, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:19]

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sekarang Perkara 162, Kabupaten Donggala. Silakan, KPU-nya.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [30:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:40]

Baik.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [30:41]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]

Suaranya bariton, ini.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [30:48]

Siap, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]

Ya, nyanyinya harus jazz atau blues. Jangan nyanyi dangdut, enggak cocok.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [30:57]

Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami untuk menyampaikan jawaban yang pada pokoknya saja, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:09]

Ya. Ini suaranya menentramkan, ini, ya. Terus?

471. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:15]

Untuk jawaban kami, telah kami susun secara sistematis. Yang pertama ada Eksepsi, di dalam Eksepsi ini, ada empat jenis Eksepsi kami, Yang Mulia.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]

Ya.

473. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:26]

Yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengenai Legal Standing, Kedudukan Pemohon.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:36]

Ya.

475. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:37]

Yang ketiga, mengenai Eksepsi perbaikan permohonan.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:43]

Oke.

477. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:43]

Dan yang terakhir mengenai obscur libel.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:46]

Oke. Sekarang pokok-pokoknya saja.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:51]

Baik, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:52]

Tidak ada kewenangan, ya?

481. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:53]

Ya, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak berwenang mengadili perkara a quo, Yang Mulia.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:59]

Terus, yang kedua?

483. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [31:59]

Dan kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]

Dibacakan, ya.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:02]

Terus. Lebih lanjut, mengenai (...)

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:06]

Tenggang Waktunya itu.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:11]

Kedudukan Hukum (Legal Standing).

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:13]

Ya keduduk ... tidak memenuhi 158?

489. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:17]

Benar, Yang Mulia. Karena jumlah penduduk Kabupaten Donggala sejumlah 13 ... 316.037, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:26]

Ya.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:27]

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), ketika jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, maka perbedaan suara paling banyak sebesar 1,5%, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:44]

Ini kenyataannya berapa, fakta hukumnya?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:47]

Kalau ini selisihnya 6,82, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:51]

6,8.

495. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:54]

Ya.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:55]

Oke, berarti melebihi ambang batas (...)

497. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [32:57]

Melebihi ambang batas, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:58]

Oke. Terus, berikutnya.

499. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [33:03]

Selanjutnya, mengenai Eksepsi tenggang waktu perbaikan Permohonan.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:10]

Ya.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [33:11]

Jadi, di dalam perbaikan Permohonan Pemohon, itu dimohonkan pada persidangan pendahuluan, pada tanggal 13 Januari 2025, Pemohon meminta agar Permohonan dilakukan renvoi. Hanya saja dari keseluruhan yang akan direnvoi, itu sudah mengubah isi substansi daripada Permohonan, Yang Mulia.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:37]

Ya.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [33:38]

Maka, kami menganggap bahwa perbaikan atau renvoi Permohonan pada tanggal 13 Januari 2025 pada saat persidangan pendahuluan, kami tolak, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:51]

Oke. Jadi, yang berlaku adalah Permohonan awal, ya?

505. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [33:54]

Ya. Benar, Yang Mulia.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:55]

Nanti yang direspons berarti Permohonan awal, berarti?

507. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [33:57]

Ya. Benar, Yang Mulia.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:58]

Oke, baik.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [34:01]

Mengenai Eksepsi selanjutnya, Permohonan tidak jelas (obscuur libel).

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:08]

Kabur, ya. Saya tahunya kabur. Kalau obscuur, saya enggak tahu saya.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [34:13]

Siap, Yang Mulia.
Mengenai Eksepsi (...)

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:16]

Dari Belanda, tho, Mas?

513. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [34:19]

Mengenai Eksepsi kabur (...)

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:20]

Ya, obscuur, ya?

515. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [34:21]

Ya. Siap, Yang Mulia.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:22]

Ya, kenapa obscuur?

517. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [34:24]

Pemohon menyatakan dalam Petitum angka 2, di halaman 16 sampai halaman 17, berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala (...)

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:36]

Ya.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [34:36]

Nomor 1423 dan seterusnya, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2014. Sementara faktanya, pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Donggala itu di hari Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, Yang Mulia, bukan 2014.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:56]

Ya.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [35:01]

Mengenai ... selanjutnya, berkenaan dengan hal-hal yang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun berkenaan dengan waktu dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:28]

Ya.

523. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [35:28]

Yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pihak Terkait itu menjadi berkurang sebanyak 6.193.

Nah, sementara untuk Paslon Pemohon (Paslon Nomor 5) menjadi bertambah sejumlah 6.193.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:51]

Ya. Itu kaburnya, ya, yang lain dianggap dibacakan.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [35:54]

Ya. Benar, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:55]

Sekarang langsung di pokoknya, gimana?

527. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [35:59]

Dalam pokok Permohonan.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:01]

Ya.

529. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [36:04]

Pada bagian 4 Pokok Permohonan, angka 2, tabel 4, halaman 8, ini dibuat tabel oleh Pemohon, sebagaimana tabel yang dibuat.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:18]

Tapi kosong, enggak ada isinya?

531. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [36:20]

Ada, Yang Mulia.

Jika disandingkan antara perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam ta belnya, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Karena mengenai berkurangnya ... berkurangnya jumlah suara Pihak Terkait dan bertambahnya jumlah suara Pemohon. Alasan perolehan suara Pihak Terkait, tidak memuat mengenai uraian jelas peristiwa bagaimana bertambahnya perolehan suara Pemohon dan bagaimana berkurangnya jumlah Pihak Terkait.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:07]

Ya.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [37:08]

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Berkenaan dengan dalil Pemohon, mengenai keberpihakan aparaturnya pemerintah desa kepada pasangan calon. Ini ada beberapa aparaturnya pemerintah desa, Yang Mulia.

Yang pertama itu sekretaris ... Sekretaris Desa Tondo, Kecamatan Sirenja. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada poin A halaman 9, menurut Termohon, dalil yang dimaksud tidak berdasarkan hukum dan bersifat asumsi. Faktanya, Sekretaris Desa Tondo atas nama Sutarno adalah bukan sebagai tim kampanye maupun sebagai petugas penghubung Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor Urut 3, sesuai dengan surat keputusan nomor ... dan seterusnya. Kami lampirkan bukti berdasarkan Bukti T-3. Sehingga, Sekretaris Desa

Tondo, Kecamatan Sirenja, atas nama Sutarno dimaksud adalah tidak pernah terlibat sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor Urut 3.

Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara lengkap dan jelas bagaimana bentuk keberpihakan Sekretaris Desa Tondo atas nama Sutarno kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam mempengaruhi pemilih yang berkorelasi dengan signifikansi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja tersebut, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:47]

Ya. Itu dan seterusnya dianggap diucapkan, ya, dibacakan.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [38:51]

Baik, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:52]

Terus? Dalil (...)

537. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [38:54]

Dan yang ... pada pokoknya, Yang Mulia. Mohon izin, kami tambahkan, untuk di desa tersebut juga pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, saksi ... semua saksi ikut bertanda tangan, termasuk Saksi Pemohon, Yang Mulia (...)

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:08]

Ya.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:08]

Di dalam C.Hasilnya.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Ini yang mau saya tersukan.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:10]

Ya.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:10]

Ya. Jadi di TPS-TPS yang diduga oleh Pemohon bermasalah, semua saksi tanda tangan?

543. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:18]

Bertanda tangan, Yang Mulia, semua saksinya.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:19]

Kemudian, di rekapitulasi di tingkat kecamatan?

545. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:22]

Ada yang bertanda tangan, ada pula juga tidak bertanda tangan, Yang Mulia.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:26]

Ada berapa kecamatan yang tidak tanda tangan?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:29]

Ada dua kecamatan, Yang Mulia.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:31]

Dua kecamatan, kecamatan apa itu?

549. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:34]

Kecamatan Balaesang tidak hadir, Yang Mulia.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:37]

Oh, tidak hadir?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:37]

Sehingga tidak ditandatangani. Ya, Yang Mulia.

552. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:39]

Oke, terus satunya lagi apa?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:41]

Sirenja. Untuk kecamatan Sirenja karena instruksi, sehingga tidak (...)

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:46]

Tanda tangan (...)

555. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:47]

Ditandatangani, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:47]

Pada waktu rekapitulasi di tingkat ... anu ... kota ... oh, kabupaten, ya?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:54]

Tidak ditandatangani, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:56]

Jadi pasangan pemil ... anu ... Pemohon, enggak tanda tangan?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [39:59]

Benar, Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Ada catatan khusus apa, di situ?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [40:02]

Ada, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:02]

Apa catatan khususnya?
Enggak usah dibisikan, tapi ... anu saja langsung (...)

563. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [40:08]

Baik, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:09]

Jawab sendiri. Langsung boleh.

565.**TERMOHON: NURBIA [40:11]**

Ya. Izin, Yang Mulia. (...)

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:12]

Nanti kalau dibisikan kedekatan, enggak boleh.

567. TERMOHON: NURBIA [40:15]

Baik. Izin, Yang Mulia. Catatan kejadian khususnya pada saat itu, saksi Pemohon tidak bertanda tangan. Pada prinsipnya, menerima hasil. Hanya saja kecewa dengan tingkat partisipasi, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Oke. Partisipasinya berapa?

569. TERMOHON: NURBIA [40:30]

73,4, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:31]

Oh, 73,4. Termasuk besar ini di Indonesia.

571. TERMOHON: NURBIA [40:36]

Ya, Yang Mulia.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:37]

Ya. Terus apa lagi, Bu?

573. TERMOHON: NURBIA [40:41]

Ya. Hanya itu, Yang Mulia. Kalau kejadian khusus terkait dengan (...)

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:43]

Yang di tingkat ... anu ... kabupaten?

575. TERMOHON: NURBIA [40:45]

Kabupaten, Yang Mulia.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:46]

Oke. Terus, silakan diteruskan.

577. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [40:49]

Baik, Yang Mulia. Terus mengenai pokok Permohonan tentang balas jasa pemilih kepada Paslon 03 atas pemberian paket Sembako, itu di Permohonan Pemohon ada di halaman 12. Menurut Termohon juga, dalil ini tidak berdasar hukum serta terkesan bersifat asumsi.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Ya.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [41:10]

Sebab selama pelaksanaan tahapan pemilihan bupati, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu berkenaan dengan hal yang dimaksud, Yang Mulia.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:22]

Ya. Nanti Bawaslu, ya, di respons. Terus, apa lagi?

581. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [41:27]

Mengenai money politics (politik uang) juga sama, Yang Mulia. Tidak pernah ada (...)

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:34]

Tidak ada laporan?

583. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [41:36]

Benar, Yang Mulia.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:37]

Oke. Ini juga Bawaslu nanti gimana, apa ada money politics atau tidak. Menurut Termohon, enggak ada.

Ya. Sekarang Petitum saja, terakhir.

585. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [41:47]

Baik, Yang Mulia.

Untuk keseluruhan jawaban dalam pokok Permohonan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:53]

Ya. Ditolak seluruhnya, ya.

587. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [41:55]

Ya. Benar, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:56]

Terus, Petitemnya?

589. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [41:57]

Untuk Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.40 WITA.

3. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

1. Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom., dan Abd. Rasyid, S.H., perolehan suara 10.241.
2. Idam Paga ... Pagaluma, S.H., dan Abdul Azis Daming, S.H., perolehan suara 26.060.
3. Vera Elena Laruni, S.E., dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si., perolehan suara 61.883.
4. Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P., dan Drs. Arwin, S.H., perolehan suara 11.083.
5. Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P., perolehan suara 50.949.

Total suara sah 160.216.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon, Wijaya dan kawan-kawan semua bertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

Baik. Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, Perkara 162. Silakan.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [43:53]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Pihak Terkait.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:03]

Walaikumsalam.

Ya, Eksepsinya ada?

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:11]

Eksepsi ada, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:12]

Ya, apa? Eksepsi tentang apa saja?

**595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:14]**

Baik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:17]

Ya, tidak berwenang. Terus?

**597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:19]**

Ya. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]

Ya. Terus, yang lain?

**599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:32]**

Yang lain, terkait tentang tenggang waktu, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]

Ya.

**601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:38]**

Kami dalilkan di halaman 5, poin 7, dan halaman 6, Yang Mulia.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46]

Ya.

**603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:47]**

Terkait tenggang waktu perbaikan (...)

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50]

Perbaikannya melewati tenggang waktu?

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:52]

Ya, perbaikannya melewati tenggang waktu, Yang Mulia, menurut perhitungan kami.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:55]

Oke. Jadi, yang dipakai adalah Permohonan awal, ya?

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [44:58]

Ya, Permohonan awal yang tertanggal 9, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:01]

Ya. Terus, yang lain lagi?

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [45:04]

Berikutnya, terkait Legal Standing, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:12]

Legal Standing. Enggak punya Legal Standing?

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [45:14]

Enggak punya Legal Standing.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:15]

Karena ambang batasnya melebihi?

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [45:17]

Ambang batas ... melebihi ambang batas, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Oke, seluruhnya dianggap dibacakan Keterangan itu.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [45:22]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:24]

Terus, ada lagi?

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [45:25]

Dianggap dibacakan.

Yang berikutnya, terkait tentang Permohonan kabur, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Permohonan kabur. Kenapa kabur?

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [45:32]

Ya, kabur ... kaburnya, Yang Mulia, pada halaman ... dalam Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember, Permohonan awal, di halaman 8, di angka 2. Itu suara ... suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait itu hanya dititik-titik, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:04]

Ya, ya. Masih kosong itu, ya?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [46:05]

Masih kosong, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:07]

Suaranya blangkao itu.

**623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [46:08]**

Ya.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]

Ya, tidak lengkap. Tapi perbaikannya terlambat, ya?

**625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [46:14]**

Ya, perbaikannya terlambat, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:16]

Oke. Ya, itu kita juga (...)

**627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [46:18]**

Ya.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:19]

Lihat itu.
Terus, sekarang di pokok Permohonannya?

**629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [46:22]**

Terkait masalah pokok Permohonan, Yang Mulia. Saya serahkan ke rekan saya, Yang Mulia (...)

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:29]

Ya.

**631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [46:29]**

Untuk menyampaikan.
Terima kasih.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:31]

Pemerataan pekerjaan.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [46:33]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pada pokok Permohonan ini, Yang Mulia, ada 12 poin, tapi kami sampaikan yang pokok-pokok saja.

Poin 1, 2, kami anggap dibacakan.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

Ya.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [46:51]

Poin 3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon a quo pada pokok perkara angka 2, halaman 8 sampai dengan 9, terhadap perhitungan suara secara melawan hukum dan dengan hasil penghitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:15]

Ya, terus?

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [47:17]

Yang kedua. Poin 4. Bahwa tidak benar Pemohon a quo yang melakukan penghitungan secara melawan hukum dengan menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 61.883 suara sah, hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Donggala.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:47]

Ya.

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [47:48]

Poin selanjutnya, kami anggap dibacakan.
Poin 6. Izin, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:55]

Ya.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [47:56]

Bahwa Pihak Terkait menolak pula dalil dan klaim sepihak Pemohon a quo, yang tanpa dasar penghitungan yang jelas menyebutkan berada diperingkat kesatu, tanpa menunjukkan uraian jelas hasil penghitungan perolehan jumlah suara di ... didapatkan tersebut.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [48:22]

Lanjutnya, poin 7. Bahwa tidak benar dan keliru pendapat Pemohon a quo, Permohonan angka 3, halaman 9 sampai dengan halaman 11, dengan tanpa dasar dan seterusnya. Lanjutnya, kami anggap dibacakan.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:45]

Ya.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [48:45]

Poin 8.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:46]

Langsung Petitum saja.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [48:48]

Langsung Petikum. Izin, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Ya.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [48:51]

Petikum.

Bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta, sebagaimana tersebut di atas. Olehnya, patut kiranya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan dan menetapkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon a quo.

Dalam Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dengan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Atau apabila, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:12]

Ya.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI [50:12]

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:18]

Baik, terima kasih.
Sekarang Bawaslu Kabupaten Donggala, saya persilakan.

652. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:25]

Ya. Baik, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:27]

Ada resumenya?

654. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:28]

Resume, ada, Yang Mulia. Ada (...)

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:30]

Berapa halaman resumenya?

656. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:31]

Ada 9 halaman, Yang Mulia.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:34]

Kebanyakan itu.

658. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:34]

Siap.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]

Persoalannya enggak anu ... jadi, saya tanya saja, ya?

660. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:42]

Siap, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Ada laporan?

662. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:46]

Terkait laporan, ada, Yang Mulia.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:48]

Berapa laporan yang masuk?

664. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:50]

Ada 13 laporan.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]

13 laporan?

666. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:53]

Ya.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:53]

Terus, klasifikasinya laporan itu, gimana?

668. BAWASLU: ABDUL SALIM [50:56]

Yang ... yang ditindaklanjuti ada 4.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:59]

4 ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjutan, gimana?
Nanti Bawaslu yang lain supaya menyiapkan juga begitu, ya.
Supaya cepat jalannya revolusi.

670. BAWASLU: ABDUL SALIM [51:16]

Siap, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:17]

Ya. Untuk meringankan beban ini (...)

672. BAWASLU: ABDUL SALIM [51:19]

Terkait.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:20]

Kalau begini, ya, kan? Bisa dianu ... pada membaca kesela ... keseluruhan.

4 yang ditindaklanjuti bagaimana?

674. BAWASLU: ABDUL SALIM [51:30]

Ya, kami lihat catatan kami dulu, Yang Mulia.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:32]

Oh, ya, harus.

676. BAWASLU: ABDUL SALIM [51:33]

Siap.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:34]

Kecuali kalau hafal. Yang buat stafnya itu mesti, nyarinya susah. Gimana 4 itu?

678. BAWASLU: ABDUL SALIM [52:00]

Ya, Pak ... Yang Mulia. Yang terkait dengan peristiwa, yang berada di media sosial.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]

Ya.

680. BAWASLU: ABDUL SALIM [52:18]

Itu laporan yang tidak ... hasil dari proses pelanggaran ... prosesnya itu, laporan tidak terbukti.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:28]

Tidak terbukti.

682. BAWASLU: ABDUL SALIM [52:29]

Tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:33]

Apa itu, berupa apa? Kok, sampai tindak pidana, itu? Yang laporannya berupa apa? Kok, bisa tidak termasuk bukti laporan ... anu ... tindak pidana pemilihan?

684. BAWASLU: ABDUL SALIM [52:44]

Ya. Terkait ... ya. Bahwa pa kami bacakan terkait peristiwanya, Yang Mulia.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:54]

Ya. Apa itu peristiwanya?

686. BAWASLU: ABDUL SALIM [52:55]

Pada ... bahwa pada hari sabtu dan seterusnya, sebuah akun media sosial Facebook atas nama Lolo Amrozi. Yang dimana pada saat kronologi ini ditulis, terdapat dua postingan yang di-upload oleh yang bersangkutan.

Pertama, pada sekitar jam 09.00 WITA, memposting mengenai dua foto screenshot (tangkap layar) yang berasal dari media berita tribunnews.com dan jawapost.com. Berisi berita, pada pokoknya mengenai penetapan tersangka tindak pidana korupsi atas nama Ronny Tanu Saputra. Yang mana berita tersebut tertanggal 05 dan seterusnya, di tribunnews dan jawapost.com.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:37]

Oh. Itu, ada ... anu ... berita fitnah atau hoax, gitu?

688. BAWASLU: ABDUL SALIM [53:41]

Ya, Yang Mulia.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:42]

Terus, dilihat enggak terbukti?

690. BAWASLU: ABDUL SALIM [53:43]

Ya, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:44]

Oke. Terus yang kedua, apa lagi?

692. BAWASLU: ABDUL SALIM [53:47]

Yang kedua.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Itu kan larangan dalam (ucapan tidak terdengar jelas)

694. BAWASLU: ABDUL SALIM [53:59]

Ya.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]

Menyebarkan, fitnah, macam-macam, kan, enggak boleh, kan?

696. BAWASLU: ABDUL SALIM [54:01]

Hoax, ya. Siap, Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:01]

Terus ini, enggak terbukti, ya?

698. BAWASLU: ABDUL SALIM [54:03]

Ya.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:04]

Baik, yang kedua?

700. BAWASLU: ABDUL SALIM [54:05]

Yang kedua, terkait ... kami bacakan kembali.

Bahwa pada hari Jumat dan seterusnya, bertempat di Desa Toaya Vunta, kecamatan dan seterusnya, berada di rumahnya. Datanglah seorang lelaki bernama Robi menemui pelapor. Adapun lelaki Robi tersebut, datang untuk menanyakan kepada pelapor, dengan adanya video yang didalamnya terlihat pelapor, yaitu Toveria. Dikarenakan

pelapor mengetahui tentang hal tersebut, maka ditindakinya pelapor dengan menghubungi saudaranya, Toveria. Ini terkait money politics.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:45]

Oke.

702. BAWASLU: ABDUL SALIM [54:46]

Ya.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:46]

Ini juga tidak terbukti?

704. BAWASLU: ABDUL SALIM [54:48]

Tidak terbukti, Yang Mulia.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:49]

Oke. Terus yang ketiga? Jadi tadi, penyebaran hoax, ujaran kebencian, fitnah. Yang kedua, money politics. Yang ketiga apa? Yang bisa diklasifikasikan, apa?

706. BAWASLU: ABDUL SALIM [55:26]

Ya. Kami langsung saja, Yang Mulia. Yang itu bahwa pemilih DPTb yang dimaksud, atas nama Agung Wicaksono yang menggunakan hak pilih untuk dua jenis suara. Bahwa pengawas TPS, ini terkait penggunaan hak pilih (...)

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:42]

Apa ini?

708. BAWASLU: ABDUL SALIM [55:42]

Dua suara.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:42]

Coblos ganda?

710. BAWASLU: ABDUL SALIM [55:44]

Ya.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:46]

Ya?

712. BAWASLU: ABDUL SALIM [55:47]

Ya.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:47]

Laporan mengenai coblos ganda? Coblos dua kali? Bukan?

714. BAWASLU: ABDUL SALIM [55:54]

Bukan dua kali, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:55]

Apa? Yang tidak berhak, nyoblos?

716. BAWASLU: ABDUL SALIM [55:59]

Ya.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:00]

Ya, betul? Mengenai apa?

718. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:28]

Ya, terkait tindak pidana, Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:30]

Tindak pidana apa?

720. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:31]

Tindak pidana.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]

Ya, tindak pidananya tindak pidana apa?

722. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:34]

Ya, pencoblosan dua kali.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:37]

Wah, ya, tadi kan?

724. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:38]

Tidak ... tidak terbukti, Yang Mulia.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:39]

Ya, tidak terbukti (...)

726. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:40]

Ya.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:41]

Coblos ganda.

728. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:42]

Ya.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:43]

Terus, yang terakhir, yang keempat, apa?

730. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:45]

Yang terakhir (...)

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:54]

Mestinya hafal yang memproses, kan? Malah (...)

732. BAWASLU: ABDUL SALIM [56:57]

Ya, terkait penggunaan KTP. Terkait tindak pidana juga, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:02]

Ya.

734. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:03]

Namun, tidak terbukti.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:04]

Tindak pidananya berupa menggunakan KTP orang lain atau apa itu?

736. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:06]

KTP ... KTP wilayah lain, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:16]

Oke. Dia mestinya enggak boleh nyoblos di situ, tapi menggunakan KTP-nya untuk nyoblos di situ?

738. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:22]

Ya, Yang Mulia, namun tidak terbukti.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:24]

Tidak terbukti.
Terus, ada temuan?

740. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:28]

Temuan tidak ada, Yang Mulia.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:29]

Tidak ada.
Jadi, ada peristiwa khusus apa lagi yang mau dilaporkan?

742. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:33]

Yang terkait yang di dalil Permohonan, Yang Mulia (...)

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:36]

Ya, silakan. Apa itu?

744. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:38]

Yang terkait aparat desa.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:40]

He eh.

746. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:41]

Saya langsung saja yang terkait (...)

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:42]

Tidak netral, ya, gitu?

748. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:43]

Ya, tidak netralnya (...)

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:44]

Kenapa? Silakan, dijelaskan.

750. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:45]

Hasil pengawasan dan sudah ditindaklanjuti oleh kepala desa (...)

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:48]

He eh.

752. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:49]

Kepala Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, dengan memberikan sanksi admit ... administrasi (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:55]

Administrasi.

754. BAWASLU: ABDUL SALIM [57:56]

Berupa teguran tertulis, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:57]

Oke. Jadi, sudah ditegur kepala desanya?

756. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:00]

Sudah ditegur lewat ... melalui kepala desa, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:04]

Oke, melalui kepala desa.

758. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:06]

Ini masuk di dalam dalil Permohonan.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:07]

Ya.

760. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:08]

He eh.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:09]

Terus, apa lagi?

762. BAWASLU: ABDUL SALIM [58 :11]

Terus, terkait dengan money politics yang sebagaimana didalilkan.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:15]

He em.

764. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:15]

Tidak ada temuan ataupun (...)

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:17]

Tidak ada ini tadi kan, ya, money politics.
Terus, apa lagi? Jadi, semuanya berjalan lancar?

766. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:26]

Ya.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:27]

Pada waktu rekapitulasi ... Anda punya Panwas sam ... di dalam ...
di TPS punya Panwas, kan?

768. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:32]

Punya, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:33]

Terus kemudian, di tingkat rekapitulasi kecamatan, punya Panwas
juga?

770. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:37]

Punya, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:39]

Terus, sampai di tingkat rekapitulasi kabupaten, juga ada ... hadir
kan Bawaslu-nya?

772. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:43]

Hadir, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:44]

Ada persoalan-persoalan enggak itu di tingkat tahapan itu?

774. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:47]

Ya, pada saat rekapitulasi kabupaten, Yang Mulia, di situ ada dua saksi tidak menandatangani.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:55]

Ya.

776. BAWASLU: ABDUL SALIM [58:56]

Satu saksi tidak hadir, Yang Mulia.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:58]

Oke. Itu dari Pemohon?

778. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:00]

Dari Pemohon.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

Oke. Dia ada catatan khusus di dalam Berita Acara di situ, kenapa enggak hadir atau tidak tanda tangan?

780. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:08]

Yang pastinya yang tidak ... tidak hadir dari hari pertama sampai hari terakhir itu, tidak hadir.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Ya.

782. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:15]

Dan juga yang saksi yang ... saksi empat, ya, tidak hadir karena tidak ada konfirmasi juga. Yang dua saksi tidak menandatangani itu karena kurangnya ... alasannya kurangnya partisipasi pemilih.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:30]

Oke, ya. Padahal, partisipasinya menurut Bawaslu berapa di situ?

784. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:37]

73.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:38]

73. Dia penginnnya 200% mungkin.

786. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:43]

Ya, siap, Yang Mulia.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Ya, cukup, ya?

788. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:46]

Cukup, Yang Mulia.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:48]

Yang lain laporan dari Bawaslu, seluruhnya dianggap telah dibacakan, ya?

790. BAWASLU: ABDUL SALIM [59:52]

Siap, Yang Mulia.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:53]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada, Prof? Cukup? Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup. Baik Baik, saya akan mengesahkan alat bukti.

Pemohon ini menambahkan, tapi masih dalam rentang waktu yang diizinkan. Saudara menambahkan bukti tambahan, Bukti P-16A, P-22A, P-22B, P-23A, P-23B ... C, dan P-26A, 26B, dan 26C, 26D, dan 26E, serta 26F, dan 31A. Betul, Pemohon? Ada tambahan itu? Ya. Baik.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Kemudian Pihak Termohon, T-1 sampai dengan T-10?

792. KUASA HUKUM TERMOHON: M. WIJAYA S [01:01:11]

Benar, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:12]

Baik, kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-45.

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUDDIN [01:01:16]

Benar, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:17]

Baik, kemudian Bawaslu, PK-28.3-1 sampai dengan PK-28.3-64.

796. BAWASLU: ABDUL SALIM [01:01:26]

Benar, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]

Ya, seluruhnya disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, untuk Para Pihak di Perkara 162, sudah kita selesaikan.

Sekarang kita ke Kalimantan Timur. Silakan, KPU Kalimantan Timur, di mana? Oh, di belakang.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:01:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:50]

Ya.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:01:51]

Mohon izin membacakan, pokok pokok (...)

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:53]

Ya, Tv-nya silakan diarahkan ke Kalimantan Timur ini sekarang. Ya, kameranya siapkan ke sana.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:04]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:05]

Ya.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:06]

Kami menyampaikan ada tiga dalam Eksepsi, Yang Mulia (...)

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:10]

Ya.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:11]

Ada tiga Eksepsi (...)

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:12]

Apa?

808. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:12]

Yang pertama terkait dengan kewenangan mengadili.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:14]

Ya.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:15]

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon, meskipun SK penetapan hasil, tetapi dalam Petitum Pemohon meminta diskualifikasi. Diskualifikasi itu pada hakikatnya adalah menguji surat Keputusan KPU terkait dengan penetapan pasangan calon peserta, Yang Mulia, menurut kami (...)

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:30]

Ya.

812. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:32]

Bukan (...)

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:32]

Oleh karena itu tidak berwenang, ya?

814. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:33]

Oleh, karena itu Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak berwenang untuk mengadili Permohonan.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:38]

Ya, terus.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:39]

Untuk selebihnya dianggap dibacakan, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:42]

Ya.

818. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:02:43]

Selanjutnya untuk berkenaan dengan Kedudukan (Legal Standing) Pemohon. Ambang batas yang diperkenankan oleh undang-undang di Kalimantan Timur untuk Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah 1,5% atau jika dikonversi ke dalam jumlah suara sekitar ... bukan sekitar, tapi 26.852 suara, Yang Mulia.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:08]

Ya.

820. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:09]

Tetapi selisih antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 adalah 202.606 suara atau senilai dengan 11,3%, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:20]

11,3.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:22]

Betul, Yang Mulia. Jadi (...)

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:23]

Oke.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:24]

Pemohon tidak memiliki (...)

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:25]

Lebih ambang batas, ya?

826. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:27]

Betul, Yang Mulia.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:27]

Karena melebihi ambang batas, maka tidak punya Legal Standing?

828. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:30]

Betul, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:31]

Ya, terus apa lagi?

830. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:32]

Selanjutnya berkenaan dengan Eksepsi Permohonan tidak jelas atau kabur.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:38]

Kabur.

832. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:03:39]

Ya. Jika mengikuti pada konstruksi undang-undang ... Pasal 75 MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Posita dan Petitum untuk mengajukan proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, harus mencantumkan ... apa namanya ... jumlah suara yang benar menurut Pemohon (...)

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:59]

Angka-angka perolehan suara.

834. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:00]

Betul, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:01]

Ya.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:01]

Jika mengikuti logika yang disampaikan tadi, setidaknya-tidaknya ada sekitar 20.000-an suara, ya. Yang harus dibuktikan oleh (...)

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:11]

Buktikan.

838. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:12]

Ya, Pemohon. Atau jika mengikuti logika selisih 11 %, ada sekitar 202.000 suara yang harus dibuktikan oleh Pemohon.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]

Ya.

840. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:21]

Dan jika dikaitkan dengan maksimal jumlah TPS, Yang Mulia. Mohon izin.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:24]

Ya.

842. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:24]

Setidak-tidaknya untuk 202.606 suara dan dalam hal diasumsikan Pemohon memperoleh suara seluruhnya 600 suara per-TPS, setidaknya tidaknya ada 338 TPS yang harus disandingkan di dalam Permohonan.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:40]

Oke.

844. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:40]

Atau jika, dalam hal mendapatkan setengahnya 300 suara, setidaknya tidaknya ada sekitar 676 TPS yang harus disandingkan.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:50]

Oke.

846. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:50]

Faktanya dalam persidangan, dalam Permohonan, Yang Mulia, mohon izin. Tidak ada satupun penyandingan data di tingkat TPS, Yang Mulia.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:58]

Ya.

848. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:04:58]

Dan dalam persidangan pendahuluan, secara eksplisit, Kuasa Hukum Pemohon ketika ditanya oleh, Yang Mulia Prof. Enny, menyatakan bahwa memang tidak pernah fokus untuk menyandingkan data-data TPS, Yang Mulia.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:10]

Ya.

850. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:05:11]

Demikian, Yang Mulia.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:12]

Ya. Itu Eksepsi, ya?

852. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:05:13]

Itu Eksepsi, Yang Mulia.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:14]

Terus pokok Permohonannya, sekarang?

854. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:05:16]

Terkait dengan pokok Permohonan, Yang Mulia. Dari sekitar 50 ... sam ... 50-an halaman yang disampaikan, kami hanya ... apa namanya ... disebut dua kali, Yang Mulia. Terkait dengan Termohon dikatakan menjadi pilar-pilar yang turut mereduksi kualitas dan integritas demokrasi. Kemudian, Termohon dianggap menjadi aktor yang melakukan politik uang atau dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang tersebut.

Menurut kami, Yang Mulia, dalil tersebut keliru. Karena Termohon dalam hal ini adalah KPU, itu bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu. Lagipula dalil yang disampaikan tidak dijelaskan, siapa yang dimaksud Termohon, dalam pengertian di tingkat kabupaten, kah? Di tingkat PPK, kah? Atau di tingkat PPS, kah? Atau KPPS? Dan tidak dijelaskan juga mengenai secara detail kapan, dimana, dan bagaimana caranya Termohon membiarkan adanya politik uang tersebut. Dan sampai saat ini, tidak pernah ada satu putusan atau rekomendasi Bawaslu terkait dengan apa yang didalikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:21]

Ya.

856. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:06:22]

Baik, berikut (...)

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:23]

Terus?

858. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:06:24]

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil bahwa ada pelanggaran hukum yang juga terjadi secara prosedural pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut Pemohon, Pemohon menemukan banyak terjadi kesalahan pencatatan angka, perolehan suara di tempat pemungutan suara. Kemudian, saksi Pemohon mengajukan keberatan atas kejadian kesalahan pencatatan tersebut, namun demikian kelompok penyelenggara dan pengawas tidak menyelesaikan keberatan tersebut.

Terhadap dalil tersebut Yang Mulia, tidak dijelaskan secara eksplisit, dimana lokasinya, kemudian soal hasil akhirnya. Kemudian tidak juga dijelaskan pada konteks apa, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran prosedural. Terlebih sebagaimana tadi di ... kami sampaikan, Yang Mulia. Pemohon tidak menyebutkan secara eksplisit detail-detail TPS mana. Sebagai informasi, Yang Mulia, di Kalimantan Timur terdapat 6.274 TPS yang tersebar di 105 kecamatan. Jadi secara umum, apa yang disampaikan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan karena itu tidak dapat diterima, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil yang lain, Yang Mulia. Mengenai partai politik yang seolah-olah membuat Pemohon tidak bisa maju sebagai calon gubernur. Kami sampaikan bahwa secara umum, Yang Mulia, proses pengumuman pendaftaran pasangan calon, penerimaan pendaftaran, kemudian verifikasi, dan seterusnya, sehingga penetapan pasangan calon, Yang Mulia. Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:57]

Ya.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:07:57]

Baik. Untuk selanjutnya, berkenaan dengan ... praktik ... dugaan praktik politik uang, ya. Kami bisa sampaikan bahwa sampai saat ini, tidak

ada Putusan Gakkumdu, atau dari Bawaslu, atau dari kepolisian, dan kejaksaan terkait dengan itu, Yang Mulia.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:14]

Ya. Jadi, tadi yang anu ... saya minta penegasan. Jadi, tidak ada rekayasa pencalonan yang dilakukan partai-partai politik di Kalimantan Timur, berarti?

862. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:08:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:24]

Tidak ada itu, ya?

864. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:08:25]

Tidak ada, Yang Mulia. Karena faktanya, yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon, Yang Mulia.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:28]

Tetap sebagai calon.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:08:29]

Baik, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:30]

Ya, terus.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:08:33]

Itu sebagian besar sudah kami jawab dan kami bantah (...)

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:38]

Ya, sudah. Kalau begitu Petitumnya sekarang.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:08:40]

Ya, baik, Yang Mulia. Baik.

Baik, Petitem.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 ... Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut.

Nama Pasangan (audio terputus).

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:25]

Mati, ya?

872. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:09:26]

Mati, Yang Mulia.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:27]

Ya, tolong, Petugas, diganti. Besok, lain kali kalau mau sidang, dicek seluruhnya, ya.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:09:36]

Baik. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:38]

Oh. Nah, itu tadi yang salah berarti yang ngomong itu.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:09:43]

Baik.

Nama Pasangan Calon 1, Dr. Ir. H. Isran Noor, M. Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si., dengan perolehan suara 793.793.

Kedua. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si., dengan perolehan suara 996.399 suara.

Dengan total suara sah 1.790.192 suara.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Muhammad Ali Fernandez dan kawan-kawan, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:21]

Baik, terima kasih.
Itu tadi miknya kesemprot, basah, jadinya enggak mau bunyi itu.
Sekarang Pihak Terkait, saya persilakan.

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:10:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:33]

Ya.

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:10:33]

Kami dari Pihak Terkait atas nama Agus Amri dan rekan saya Muhammad Faisal, mewakili Calon Gubernur Nomor Urut 2 dalam (...)

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:44]

Ya.

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:10:45]

Pilkada Kalimantan Timur.
Kami ingin me-highlight pada poin 12 dari Permohonan Pemohon yang merupakan intisari dari keseluruhan Permohonan setebal 52 halaman. Kami kutip bagian-bagian yang akan kami respons dari angka 12 dari pokok Permohonan dari Pemohon, Yang Mulia.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:09]

Ya.

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:11:10]

Di sana ada 4 poin terkait kartel politik, terkait tuduhan tentang money politics, terkait pelibatan aparatur dan struktur pemerintahan dalam pemenangan, dan yang terakhir tentang penyelenggaraan Pemilu yang tidak netral dan tidak profesional.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:25]

Ya.

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:11:26]

Kami akan merespons satu per satu dari pokok Permohonan. Namun demikian, sebelumnya kami akan merespons Eksepsi dari kami sebagai Pihak Terkait.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Ya. Eksepsinya gimana? Singkat-singkat saja.

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:11:40]

Eksepsinya bahwa Mahkamah tidak berwenang. Dikarenakan dari seluruh pokok Permohonan adalah merupakan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik sesungguhnya.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:50]

Oke, terus.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:11:51]

Dan termasuk Legal Standing dari Pemohon. Dan kami ingin berterima kasih, karena pada angka 12, hal ini pun juga sudah diakui oleh Pemohon karena memang jauh melampaui ambang batas yang disyaratkan Pasal 135A, yaitu 11,3%.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:06]

Ya.

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:12:06]

Kami di Kalimantan Timur dengan populasi 2.000.000 sampai 6.000.000 , ikut pada ketentuan 1,5%.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:14]

Ya.

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:12:14]

Berarti maksimal angka koefisiennya adalah 26.000 sekian.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:19]

Ya.

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:12:19]

Dan kami 202.000 sekian.

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan terkait kartel politik. Tuduhan mengenai kartel politik atau tindakan memborong partai, kami respons dengan bukti-bukti kami. Bahwa sesungguhnya partai politik itu bukan seperti barang, Yang Mulia. Dimana kita datang ke pasar, bawa duit, dan kita bisa bawa pulang partai yang kita mau.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:45]

Ya.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:12:45]

Dalam kenyataannya, partai politik itu menerapkan standar yang sangat ketat dalam memilih calon-calon yang akan mereka usung dalam pemilihan kepala daerah, berarti seperti itu. Jangankan untuk mendapatkan partai, mendapatkan seorang cewek saja saya kira kita susah sekali, apalagi partai. Karena partai punya standarnya sendiri. Begitu pun ... tuduhan partai politik tidak berdasar dan kami buktikan di

mana sebenarnya, baik Paslon Nomor 1 dalam hal ini Pemohon, maupun Paslon 2, sama-sama melakukan pengajuan atau Permohonan (...)

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:14]

Ya, ya.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:15]

Rekomendasi ke semua partai (...)

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:16]

Perumpamaannya mendapatkan cewek, ini.

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:18]

Siap.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:19]

Ya. Kayanya Kuasa Hukumnya ini playboy, ini.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:22]

Wah, enggak, Yang Mulia. Saya (...)

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:24]

Punya pengalaman mendapatkan cewek susah, ini.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:26]

Dan gagal, Yang Mulia. Susahnya minta ampun, apalagi merayu partai politik.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:29]

Oh, ya.

**908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:30]**

Cewek saja susah, sumpah.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]

Ya.

**910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:33]**

Jadi tuduhan ini jelas tidak (...)

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:35]

Enggak (...)

**912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:35]**

Berdasar, seolah-olah partai politik (...)

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:36]

Kalau tanya ... kalau tanya Prof. Anwar, enggak, gampang itu.

**914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:40]**

Ya, soalnya Beliau ganteng, daripada saya, Yang Mulia. 11-12 lah dengan ... Prof. Arief Hidayat. Tapi mungkin akan dievaluasi sama Prof. Be ... Betty terkait ini ... Prof. Enny.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:53]

Jangan ... anu cewek, nanti Prof. Enny marah, nanti.

**916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:13:55]**

Oh, enggak, hanya sebagai contoh. Bahwa semuanya punya kebebasan untuk mengatakan ya dan (...)

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

Ya (...)

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:00] NOMOR

Tidak.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

Ya, lanjutkan.

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:01] NOMOR

Poinnya di situ, Yang Mulia.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:03]

Jadi tidak ada rekayasa, ya?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:04] NOMOR

Tidak ada rekayasa, semuanya (...)

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:05]

Baik (...)

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:05] NOMOR

Natural, alami sekali.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:07]

Ya.

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:08] NOMOR

Semua sama di hadapan partai politik.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:10]

Baik.

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:11]

Selanjutnya ... terkait ada yang syarat spesifik, kami harus sampaikan. Terutama buku ajaib yang setebal ribuan lembar yang dilambai-lambaikan oleh rekan Refly Harun sebagai Pemohon yang secara spesifik kami harus respons itu, Yang Mulia.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:29]

Ya.

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:30]

Bahwa (...)

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:30]

Gimana responsya?

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:14:31]

Dalam kenyataannya, buku dengan judul *Siraman Money Politics* Rudy Mas'ud pada Pilkada Kutai ... Pilgub pada Kabupaten Kutai Kartanegara, semacam LPJ, gitu. Kami pastikan, bahwa buku tersebut karang-karang disampul ulang, dimana data-data dari orang-orang yang ada di dalam buku itu, seketika diverifikasi dan ... dan itu sudah pernah disampaikan ke Bawaslu, itu tidak valid. Sehingga laporan itu tidak dapat dilanjutkan oleh Bawaslu.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:00]

Oke.

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:15:01]

Latar belakangnya itu ... dan orang yang membuat buku itu pun, saat ini sedang kami laporkan. Karena dengan tuduhan manipulasi bukti

yang ternyata kemudian akhirnya diajukan kepada sidang, Yang Mulia, ini. Saya kira (...)

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:13]

Ya.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:15:13]

Ini akan bagus. Bahwa Saudara atas nama Odi Setiawan alias Wawan. Sedang ... sedang kami laporkan, karena akhirnya membawa buku ini ke sini. Padahal sebelumnya sudah pernah disampaikan di Bawaslu dan bukti-bukti itu tidak valid.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:28]

Ya.

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:15:28]

Oke, selanjutnya terkait masih money politics, keterlibatan Harum Center. Dapat kami jelaskan Harum Center itu (Hj. Rudy Mas'ud Center). Sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang memang berdiri dan beraktifitas jauh sebelum Pilkada, Yang Mulia. Harum Center ini, memang setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sudah kami sertakan bukti-bukti foto-foto dan berita-berita kegiatan yang jauh dari setahun se ... sebelum seribu ... 2020, dan itu jauh sebelum Pilkada. Jadi itu tidak bisa dikaitkan, bahwa dukungan Harum Center untuk melakukan atau terkait dalam kegiatan memberikan dukungan terhadap Pilgub, yang kebetulan diikuti oleh Rudy Mas'ud.

Selanjutnya, kami ingin merespons tentang itu, tentang ketidaknetralan aparat atau TSM, ya. Kami ingin merespon ini, sebagai penantang, Yang Mulia. Saya ingin kita semua punya akal sehat. Siapapun orang waras bilang bahwa penantang tidak bisa menggerakkan aparat. Berbeda halnya jika incumbent.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:40]

Jadi, yang incumbent itu malah Pemohon, ya?

**940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:16:42]**

Pemohon.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:44]

Ya.

**942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:16:44]**

Ajaibnya, kami yang tidak pernah menjabat ketua kepala desa, lurah, camat, bupati, apalagi gubernur, dituduh melakukan menggerakkan aparat sipil, penyelenggaran negara untuk memberikan dukungan.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:55]

Ya. Itu dalil itu, ditolak, ya.

**944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:16:56]**

Yes. Dan kami tolak, itu.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:58]

Ya. Terus.

**946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:17:00]**

Terakhir. Kalau itu, mungkin porsinya penyelenggara, Yang Mulia.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:05]

Ya. Tadi sudah dijawab (...)

**948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:17:05]**

Karena itu tuduhan dialamatkan, ketidaknetralan aparaturnya (...)

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:06]

Sudah dijawab (...)

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:17:10]

Tadi sudah dijawab. Nanti ada Bawaslu, itu porsi saya, enggak mau mengambil alih porsi mereka.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:12]

Ya.

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:17:12]

Tapi akan ada bagian yang akan disampaikan oleh rekan saya.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:15]

Nanti kalau kelebihan mengambil alih, nanti honorinya terlalu banyak, itu.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:17:18]

Baik. Amin. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi akan ada sedikit yang akan disampaikan lagi, oleh rekan saya.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:23]

Ya, Petitumnya. Kalau ... anu ... sudah. Silakan.

956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMMAD FAISAL [01:17:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan tidak dapat masuk pemeriksaan lanjutan.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2004 ... 2024 tertanggal 9 Desember 2024.
4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 Nomor Urut 1, Pasangan Calon Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si., perolehan suara=773.79 ... 793.793.
 Nomor Urut 2, Paslon H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Sena Aji, M.Si., perolehan suara=996.399 suara.
 Dari total surat suara sah=1.790.192 suara.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 2, atas nama H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Sena Aji, M.Si., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hormat kami, Yang Mulia, Kuasa Hukum Pihak Terkait Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A, Muhammad Faisal, S.H., M.H., C.L.A., dan rekan-rekan dari Kantor Hukum Agus Amri dan Affiliates, Kalimantan Timur.

Terima kasih, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:42]

Baik, terima kasih. Bawaslu Kalimantan Timur, silakan. Pokok-pokoknya saja. Resumennya panjang, enggak ?

958. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:19:49]

Resumennya 15 Halaman (...)

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:51]

Waduh (...)

960. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:19:51]

Tapi kita tidak akan baca semua, Yang Mulia.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

Ya. Yang pendek saja, ya.

962. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:19:54]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:56]

Silakan.

964. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:19:56]

Yang terhormat, Pemohon, Termohon, Pihak KPU, dan Pihak Terkait. Kami dari Bawaslu akan menyampaikan Keterangan tertulis kami.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:03]

Ya.

966. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:20:04]

Dimana saya bersama sahabat saya dari Bawaslu Kaltim, saya sendiri Danny Bunga dan sahabat saya Daini Rahmat.
Langsung saja, Yang Mulia.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:14]

Ya.

968. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:20:15]

Bahwa terkait dengan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon ini, pada pokoknya ada beberapa poin.

Pertama. Mendalilkan terkait keberatan hasil peng ... perhitungan suara di Gubernur Kalimantan Timur. Dimana terkait dengan perhitungan surat suara, itu tidak ada laporan, atau temuan, ataupun Permohonan sengketa pemilihan kepada Bawaslu.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:41]

Dalam perhitungan tidak ada laporan, ya?

970. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:20:43]

Tidak ada laporan, tidak ada temuan pada saat per ... penghitungan surat suara (...)

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:47]

Ya.

972. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:20:48]

Di tingkat provinsi.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:49]

Terus.

974. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:20:50]

Terus, kedua. Bawaslu Kalimantan Timur sudah menyampaikan ... apa ... imbauan kepada KPU untuk menaati se ... segala proses terkait dengan ... apa ... proses dilaksanakan oleh KPU untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:09]

Ya.

976. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:21:10]

Dalil yang kedua, terkait dengan praktik politik uang. Singkat-singkat saja, Yang Mulia.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]

Ya.

978. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:21:16]

Dimana Pemohon mendalilkan membeli suara ... membeli suara warga (...)

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:19]

Ya.

980. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:21:20]

Untuk memenangkan Calon Pasangan Nomor 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di beberapa wilayah, ya, ada pendistribusian dana, terus ada ketua-ketua RT yang membagi-bagikan uang kepada warga, terus ada penyelenggara Pemilu yang tidak netral, serta ada ren ... rentetan kasus-kasus pembagian uang kepada warga, dan praktik politik uang secara TSM, di rentan waktu tanggal 25 September sampai dengan 26 Desember. Itu pokoknya, Yang Mulia.

Jadi, dari total ... dari 26 dalil Pemohon, ya, di pokok Permohonannya Pemohon, ada 7 yang tidak mem ... ada 7 ... ada 7 yang bukan laporan ke Bawaslu dan ada 3 dalil dari Pemohon yang itu kedobel.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:09]

Ya.

982. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:10]

Jadi, total ada 16 laporan yang masuk, yang sudah kita register, dan sudah kita proses penanganan pelanggaran di Bawaslu.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:16]

Di mana ada anu ... temuan apa?

984. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:21]

Dari 16 ini, terkait dengan ... rata-rata money ... politik uang ... money politics uang, dimana semuanya ini dihentikan oleh Bawaslu karena (...)

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:31]

Oke.

986. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:31]

Tidak terpenuhi unsur.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:32]

Tidak ada unsur, ya?

988. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:33]

Tidak terpenuhi unsur. Kan (...)

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:34]

Tidak terpenuhi unsur.

990. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:35]

Ya, semua melalui proses penanganan di Bawaslu melalui proses yang namanya Sentra Gakkumdu.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:40]

Ya.

992. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:41]

Semua para pihak, semua saksi-saksi, sudah kita panggil, dan memang unsurnya tidak kuat untuk kita naikkan (...)

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:47]

Tidak terpenuhi.

994. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:48]

Tidak terpenuhi unsur.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:49]

Oke.

996. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:22:50]

Terus, terkait dengan pelibatan aparaturnya dan sistem pemerin ... struktur pemerintahan.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:00]

Ya.

998. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:23:01]

Memang ada beberapa kasus yang kita tangani terkait ASN yang diduga terlibat dalam kampanye dan kita teruskan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini BKN.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:13]

BKN.

1000. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:23:14]

Ada sudah ... jadi, kita lakukan penanganan pelanggaran (...)

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:16]

Bahwa ada pelanggaran administratif?

1002. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:23:19]

Ya, itu menjadi kewenang ... kode etik daripada ASN.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:22]

Kode etik ASN.

1004. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:23:23]

Nanti ada sanksi dari BKN. Tapi sampai saat ini, kami sudah mengonfirmasi ke BKN, belum ada informasi dari sana.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Oke. Terus.

1006. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:23:29]

Terus terkait ... kami lanjutkan ke mendalilkan pelanggaran hukum juga terjadi secara ... ini yang terakhir. Terhadap prosedur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik TPS-TPS mana saja, yang dimana didalikan ada TPS, KPPS, dan pengawas, TPS tidak menyelesaikan ... keberatan. Tapi pada hasil pengawasan Bawaslu, ada prosedur-prosedur memang yang kami dapati, yang belum tepat.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:00]

Ya.

1008. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:01]

... Makanya, kami melakukan rekomendasi PSU di 6 kabupaten/kota dan ... dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Rekomendasi PSU di beberapa TPS ... ada 10 TPS yang kita reko ... rekomendasi kepada KPU.

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

Ya.

1010. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:15]

Dan sudah dilaksanakan PSU tersebut.

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:17]

Oh, KP ... ada rekomendasi PSU (...)

1012. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:20]

Ada rekomendasi.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:20]

Yang tidak dilaksanakan?

1014. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:21]

Dan dilaksanakan. Ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak. Karena kewenangan untuk melakukan PSU itu adalah kewenangan daripada KPU.

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:28]

Oke.

1016. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:29]

Karena kami mendapati dari hasil pengawasan kami. Ada beberapa apa ... pelanggaran administrasi, makanya kami bikin saran perbaikan dengan me ... menerbitkan rekomendasi PSU tersebut.

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:40]

Ya. Itu ada berapa rekomendasi PSU?

1018. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:43]

Ada 10 TPS, Yang Mulia.

1019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:45]

10 TPS.

1020. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:46]

10 TPS. Ada di bukti kami, sudah kami sampaikan di (...)

1021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:49]

Sudah ada buktinya?

1022. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:50]

Sudah ada buktinya, sudah kami lampirkan juga sebagai bukti.

1023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:52]

Oke, baik. Terus, apa lagi?

1024. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:55]

Mungkin (...)

1025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:56]

Terakhir ini, ya.

1026. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:24:57]

Kami hanya ingin ... karena kemarin sempat di ... apa ... disampaikan di dalam sidang ini terkait dengan bukti yang setebal kemarin, disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon.

1027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:10]

Ya.

1028. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:25:10]

Untuk kasus tersebut, mungkin akan dijelaskan oleh PIC (Divisi Penanganan Pelanggaran) karena Beliau yang mengambil (suara tidak terdengar jelas).

Tapi pada intinya, kasus tersebut memang dilaporkan kepada Bawaslu, dan kami sudah tindak lanjuti, dan memang buktinya tidak kuat. Buktinya tidak kuat karena saksi-saksi yang kita laporkan itu, dia tidak tahu terkait dengan itu. Cover-pun yang kita tanyakan kepada pelapor "Kenapa ... siapa yang menjilid cover ini." Dia pun tidak tahu. Jadi, memang bukti ini menurut kami tidak cukup untuk dinaikkan untuk ke tingkat penyidikan.

1029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:42]

Oke.

1030. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:25:42]

Mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya, Bang Daini Rahmat, persilakan.

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:45]

Ya. Ini sahabatnya apa? Bawaslu juga, kan?

1032. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:25:48]

Bawaslu Kaltim, khusus untuk (...)

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:50]

Khusus (...)

1034. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:25:50]

Divisi Penanganan Pelanggaran.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:51]

Oke, silakan.

1036. BAWASLU: H. DAINI RAHMAT [01:25:53]

Ya. Baik, izin, Yang Mulia. Sedikit menjelaskan, berbicara masalah terkait yang dibawa oleh Kuasa daripada Pemohon adanya Siraman Kukar, Kutai Kartanegara. Bahwa kebetulan yang melakukan klarifikasi kepada pelapor, langsung saya sendiri. Dan dari beberapa hasil klarifikasi yang kami lakukan penanganan dengan Gakkumdu, itu pelapor tidak ... bahwa ketika kita tanya bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Siraman itu, pelapor tidak tahu dan pelapor hanya dapat dari teman-teman relawan. Dan siapa yang melakukan penjilitan bukti laporan tersebut? Dan pelapor menyampaikan bahwa "Itu dari tim pelapor", seperti itu.

Dan pelapor tidak mengenal juga siapa dan nomor handphone, sekaligus dokumentasi foto yang hari ini ada dalam dokumen tersebut. Jadi, Gakkumdu melakukan penilaian bahwa tidak cukup bukti untuk masuk ke dalam tingkat pidana.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:55]

Oke.

1038. BAWASLU: H. DAINI RAHMAT [01:26:55]

Ya, izin.

1039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:56]

Ya.

1040. BAWASLU: H. DAINI RAHMAT [01:26:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

1041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:57]

Terima kasih. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

1042. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:27:01]

Mungkin itu cukup (...)

1043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:03]

Cukup.

1044. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:27:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

1045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:03]

Baik, kalau begitu. Prof. Enny, ada yang mau disampaikan? Silakan, Prof.

Ya, ini karena tingkat gubernur ada waktu agak panjang sedikit, ya.

1046. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:27:15]

Siap.

1047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:16]

Silakan, Prof. Enny.

1048. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:17]

Baik, terima kasih.

Kepada Termohon (KPU). Tadi, agak singkat yang disampaikan, ya.

Berkenaan dengan proses pendaftaran calon, ini kan kebetulan hanya ada 2 pasangan calon, ya. Pasangan calon yang pertama itu, ya, yang petahana, ya? Petahana.

1049. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:27:39]

Bukan petahana (...)

1050. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:40]

Itu proses pendaftaran calonnya itu, seperti apa? Apakah prosesnya berjalan lancar? Atau keadaan persoalan terkait dengan hal yang menyangkut dukungan partai politik dan sebagainya? Bisa dijelaskan, singkat.

1051. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:27:54]

Siap, Yang Mulia. Jadi, kedua pasangan calon itu mendaftar disaat jadwal pendaftaran, dan keduanya tidak ada masalah.

Kemudian, memang kedua pasangan calon itu mema ... apa ... memasuki masa perbaikan. Karena hanya masalah administrasi dan kemudian saat penetapan juga tidak ada masalah.

1052. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:15]

Dukungan partai politiknya, bagaimana?

1053. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:28:16]

Dukungan partai politik yang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, cukup. Dari Partai PDIP dan Partai Demokrat, Yang Mulia. Sisanya ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk yang memiliki kursi di DPRD.

1054. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:28]

Oke.

1055. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:28:29]

Kemudian, juga pelaksanaan pengambilan nomor urut, juga berlangsung sangat gembira. Sehingga kemudian masuk ke debat, kemudian ke pelaksanaan hari pemungutan suara. Dan (...)

1056. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:44]

Itu sesuai dengan (...)

1057. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:28:45]

Sesuai dengan PKPU Nomor 2, tahun (...)

1058. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:45]

Sequence-nya waktu dan segalanya, sama semua?

1059. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:28:48]

Siap, Yang Mulia.

1060. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:50]

Tidak ada yang berubah sama sekali di situ, ya?

1061. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:28:51]

Betul, Yang Mulia.

1062. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:52]

Kemudian, tadi dijelaskan tidak ada keberatan saksi, apa betul?

1063. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:28:57]

Untuk keberatan saksi pada saat?

1064. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:59]

Di TPS, dari mulai TPS ada? Ada enggak keberatan saksi di TPS?

1065. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:01]

Kalau dari TPS, saya pastikan, Yang Mulia. Saya memeriksa di info Pemilu. Tidak ada satu pun keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Kalau untuk di TPS.

1066. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:13]

Di TP ... mulai dari seluruh TPS, tadi se-TPS-nya ada berapa? 6.000, ya?

1067. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:17]

Ada 6.000-an, Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:19]

Itu yang menyatakan keberatan, ada berapa?

1069. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:22]

Rasanya tidak ada, Yang Mulia. Kalau di TPS, Yang Mulia, karena kelihatan dari C.Hasil yang dibuka di info Pemilu.

1070. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:27]

C.Hasil. Tanda tangan semua itu, saksiya?

1071. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:29]

Ha ... 6.274 tanda tangan semua.

1072. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:31]

6.000?

1073. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:31]

274 TPS.

1074. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:34]

Ya. Itu tanda tangan semua, itu?

1075. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:36]

Ya, Yang Mulia.

1076. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:37]

Kecuali yang tadi 6 rekomendasi PSU, di sebelah TPS, itu juga tanda tangan atau tidak?

1077. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:29:44]

Yang Mulia, kalau untuk di PSU, saya enggak sempat melihat. Tapi dari seluruh rekomendasi yang di ba ... disampaikan oleh Bawaslu, memang ada yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Karena tidak sesuai dengan PKPU pasal (...)

1078. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:59]

Yang tidak dilaksanakan soal apa, itu?

1079. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:30:01]

Karena ... anu ... masih seorang, satu orang saja yang me ... melakukan pencoblosan. Jadi tidak sesuai dengan PKPU (...)

1080. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:10]

Oh, hanya saat itu?

1081. TERMOHON: RAMAON DEARNOV SARAGIH [01:30:13]

Pasal 50E.

1082. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:12]

Ya, oke.

Kemudian Bawaslu, ini kan ada 6 yang direkomendasikan untuk PSU di 10 TPS tadi, ya. Itu yang 10 TPS yang dilakukan PSU itu, apakah termasuk yang didalilkan Pemohon ada di ... Pemohon ada di Kelurahan Sungai Dharma, kemudian Pampang Budaya dan seterusnya, atau di luar yang didalilkan di situ?

1083. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:30:40]

Di luar. Tapi memang ini bervariasi, ada yang pemilihan wali kota, bupati, ada juga yang gubernur.

1084. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:45]

Oh, jadi yang 10 TPS.

1085. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:30:47]

Ini keseluruhan.

1086. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:49]

Seluruhnya, ya?

1087. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:30:49]

Keseluruhan. Ada (...)

1088. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:50]

Tidak semu ... tidak berarti ini hanya untuk gubernur, tapi juga bisa bupati atau wali kota?

1089. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:30:54]

Bisa juga bupati atau wali kota, ya.

1090. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:56]

Gabungannya menjadi (...)

1091. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:30:57]

Gabungan menjadi 10 TPS.

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:59]

10. Yang dari ... apa namanya ... pengawasan Bawaslu Provinsi.

1093. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:03]

Ya

1094. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:03]

Oke.

1095. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:04]

Ingin menambahkan sedikit, Yang Mulia.

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:05]

Ya.

1097. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:05]

Terkait dengan karter politik. Tadi lupa kami sampaikan. Bahwa Bawaslu sudah ada surat himbauan, ada buktinya ke Bawaslu kepada partai politik, untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses tahapan pencalonan. Usulan dari partai politik ke KPU terkait dengan pasangan calon.

1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:22]

Oke.

1099. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:22]

Ada surat himbauan dari ... dari kami kepada partai politik.

1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:25]

Dari Bawaslu Provinsi?

1101. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:26]

Bawaslu ke ... ada buktinya, di ... disampaikan.

1102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:28]

Kalau 16 laporan yang ke Bawaslu itu, laporan untuk Paslon 1 atau laporan Paslon 2?

1103. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:34]

Laporan (...)

1104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:36]

Keseluruhan atau (...)

1105. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:36]

Paslon 1 ke Paslon 2, yang diduga money politics.

1106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:40]

Paslon 1 ke Paslon 2?

1107. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:40]

Ya, dan (...)

1108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:40]

Yang dari Paslon 2 ke Paslon 1, ada enggak laporan juga?

1109. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:43]

Tidak ada. Tidak ada, memang.

1110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:45]

Tidak ada.

1111. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:45]

Ya.

1112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:45]

Jadi, 16 laporan itu yang dari Paslon 1 ke Paslon 2?

1113. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:31:49]

Ya.

1114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:49]

16 itu, yang ditindak lanjut itu tadi, ya.

Oke. Terkait dengan bukti, Termohon. Ini bukti yang diajukan itu, ada enggak yang berkaitan dengan C.Hasil yang didalilkan ini menyangkut ada beberapa kelurahan itu, ada enggak C.Hasilnya? Berapa sebetulnya perolehan suara Paslon 1, Paslon 2?

1115. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:13]

Tidak, Yang Mulia, karena kan Pemohon tidak menyangdingkan data C.Hasil.

1116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:17]

Jadi, tidak ada (...)

1117. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:18]

Tidak ada, tidak ada, Yang Mulia.

1118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:19]

Bukti C.Hasil soal itu juga?

1119. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:20]

Tidak ada, Yang Mulia. Kami hanya menyangdingkan data kabupaten dan provinsi, Yang Mulia.

1120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:26]

Bukti apa itu?

1121. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:28]

Rekap ... rekapitulasi (...)

1122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:30]

Rekapnya saja?

1123. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:31]

Provinsi, Yang Mulia.

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:31]

Rekapitulasi tingkat kabupaten.

1125. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:32]

Betul, Yang Mulia.

1126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:33]

Ya, baik. Terima kasih.

1127. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:32:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:35]

Ya, terima kasih, Prof Enny. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik.

Ya, sudah selesai, kita sahkan buktinya.

Pemohon menambahkan Bukti P-93, P-99, sampai dengan P-135?

1129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:32:52]

Benar, Yang Mulia.

1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:53]

Ya, disahkan, ya, untuk Pemohon ini tambahannya. Bukti tambahan sesuai ... masih sesuai dengan ketentuan.

1131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:32:59]

Ya.

1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:59]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

1133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:33:00]

Yang Mulia, mohon izin, kami mau tambahan alat bukti lagi.

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:04]

Sudah enggak bisa karena sudah enggak bisa di-inzage oleh Pemohon, ya. Karena kalau masih diperbolehkan, enggak adil bagi yang lain nanti.

1135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:33:13]

Sebab, kami mau mengajukan kemarin, Yang Mulia, tetapi (...)

1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:16]

Ya, kalau kemarin kan sudah batas waktunya juga sudah lewat panjang, ya.

1137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:33:22]

Baik.

1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:23]

Tapi nanti kalau masuk sidang pembuktian, masih bisa diajukan, ya.

Baik. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-14.

1139. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [01:33:35]

Betul, Yang Mulia.

1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:36]

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-65, Pihak Terkait?

1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:33:44]

Betul, Yang ... betul, Yang Mulia.

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:46]

Ya, jangan anu ... nyari cewek lagi. PT-1 sampai dengan PT-65, dijawab dulu.

1143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:33:52]

Siap, Yang Mulia.

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:53]

Ya, betul, ya?

1145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:33:54]

Betul, Yang Mulia.

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:55]

Baik. Pihak Bawaslu, PK-21.1-1 sampai dengan PK-21.1-89?

1147. BAWASLU: DANNY BUNGA [01:34:03]

Siap. Benar, Yang Mulia.

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:04]

Ya, semuanya sudah diverifikasi, sudah betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ini kita break 10 menit dulu karena harus ke toilet, tidak pakai kateter, tidak ada ember di bawah saya, ya. Ya, kita break 10 menit, ya. Nanti, silakan ke toilet, habis itu harus masuk 10 menit sesudahnya. Sidang diskors 10 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 09.42 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.00 WIB

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Ya, sebelum saya lanjutkan, kita buka, ada sebentar untuk tadi, dari kesimpulan mengenai cewek tadi kita lanjutkan sebentar.

1150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:36:16]

Baik, terima kasih.

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:17]

Sebelum dibuka loh, ini berarti enggak masuk dalam risalah persidangan ini. Katanya Prof. Anwar itu punya pengalaman pernah gagal mendekati wanita. Terus seberikutnya disarankan kalau mau mendekati wanita konsultasinya sama Prof. Anwar.

1152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: AGUS AMRI [01:36:20]

Siap.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:25]

Ya, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka kembali, skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Nanti kalau itu tadi saya masukkan, nanti masuk Risalah kan kacau. Ini Pemohon tetap ingin memasukkan bukti, ya. P-37 (...)

1154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:11]

Benar, Yang Mulia.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:12]

Sampai ... 2 ... anu ... 2 lembar, 2 eksemplar?

1156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:15]

Ya, Yang Mulia.

1157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:16]

P-37.

1158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:16]

Karena sebelumnya sudah terdaftar di dalam daftar bukti (...)

1159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:18]

Oh, sudah terdaftar (...)

1160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:20]

Tetapi dokumennya (...)

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:20]

Tetapi belum disahkan.

1162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:22]

Ya, belum disahkan, karena dokumennya ternyata (...)

1163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:24]

Oke, sekarang (...)

1164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:24]

Tidak ditemukan (...)

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:25]

Hanya melengkapi, ya, berarti, ya?

1166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:26]

Ya.

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:26]

Baik, ini disahkan juga berarti, sudah.

KETUK PALU 1X

1168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:37:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:31]

Ya, kita lanjutkan. Jadi kita selama 45 hari duduk sidang begini, kalau enggak model begitu nanti stres kita ya. Supaya awet ... awet tua maksudnya, bukan awet muda, wong kita sudah tua. Nanti sebentar lagi saya sama Prof. Anwar sudah mau pensiun, kalau Prof. Enny masih panjang. Kalau Prof. Enny sering menolak laki-laki itu. Ini atas petunjuk Prof. Anwar semua ini loh tadi, bukan saya.

Baik, kita mulai dengan Perkara 72. Silakan, Termohon.

1170. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:25]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Wr. Wb.

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:31]

Walaikumsalam.

1172. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:32]

Perkenalkan kami Kuasa Termohon Perkara Nomor 72, hadir di sini. Saya sebagai kuasa Termohon Irfan Idham dari Kantor Hukum Titah Law Firm. Dan bersama kami di sini Termohon atas nama Pak Syahrudin. Izin, Yang Mulia, kami bacakan jawaban kami (...)

1173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:51]

Ya.

1174. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:51]

Jawaban kami akan kami sampaikan dalam bentuk poin-poin. Dan beberapa poin yang ... tidak sempat kami sampaikan, mohon dianggap untuk dibacakan.

1175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:02]

Pakai PowerPoint?

1176. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:03]

Enggak, Yang Mulia.

1177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:04]

Oh, enggak.

1178. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:04]

Kami sampaikan poinnya saja, pokok-pokoknya akan kami sampaikan.

1179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:07]

Ya.

1180. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Yang pertama Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu terhadap Perkara Nomor 72 yang diajukan oleh Lembaga Yayasan Pemantau Gerak Langkah Indonesia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Ada beberapa poin, pokok-pokok Eksepsi yang kami sampaikan, Yang Mulia. Yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut kami ... ke ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, Yang Mulia. Karena dalil Pemohon bukan merupakan dalil sengketa perselisihan hasil. Itu yang pertama.

Yang kedua dalil Permohon ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 (...)

1181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:56]

Ya.

1182. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:56]

Yang menurut kami itu bukan domain dari Mahkamah dan harusnya diajukan atau dilaporkan ke Bawaslu.

Yang kedua, Yang Mulia. Tentang, mohon izin, Yang Mulia. Tentang Legal Standing daripada Pemohon. Nah, Pemohon, Yang Mulia, karena Pemohon merupakan pemantau ... pemantau pemilih, sehingga data yang diserahkan kepada Termohon berdasarkan yang Termohon terima, itu ada Akte Pendirian Yayasan Gerak Langkah Indonesia Nomor 18 tanggal 27 bulan 6 Tahun 2022. Namun dalam penelusuran kami, Yang Mulia, satu pun baik pendiri maupun susunan dalam organ yayasan tersebut, itu tidak menyebutkan nama Termohon, Yang Mulia.

1183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:40]

Oke.

1184. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:41]

Adapun nama Pemohon, Yang Mulia, mohon izin. Adapun berdasarkan penelusuran kami, terdapat surat tugas yang diberikan kepada Pemohon dari Yayasan Gerak Langkah Indonesia. Tapi dalam surat

tugas tersebut Termo ... Pemohon hanya diberikan kewenangan untuk mendaftarkan, Yang Mulia. Lembaga pemantau Yayasan Gerak Pemantau Pemilih ini, kepada KPU Kabupaten Pasangkayu. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami beranggapan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, tentu saja ini berkaitan dengan ambang batas.

1185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:20]

Ya.

1186. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:41:20]

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, selisih suara antara kolom kosong dengan Pihak Terkait adalah lebih kurang 9,6% yang ... 9,3%, Yang Mulia. Jadi, sehingga kami beranggapan Pemohon tidak memiliki Legal Standing.

1187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:41]

Ya.

1188. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:41:42]

Kemudian, Yang Mulia, berkaitan dengan objectum litis, Yang Mulia. Bahwa permohonan Pemohon dalam Permohonannya, itu menyebutkan Surat Keputusan KPU Pasangkayu Nomor 458 yang menjadi objectum litis Permohonan Pemohon. Namun faktanya, surat penetapan adalah Nomor 758, Yang Mulia, mohon izin. Jadi, sehingga kami beranggapan, karena ini berkaitan dengan objek, sehingga Permohonan Pemohon error in objecto, Yang Mulia. Terima kasih.

1189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:17]

Oke.

1190. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:42:17]

Kemudian yang ketiga, masih berkaitan dengan Eksepsi, Yang Mulia.

Yang pertama, soal Eksepsi dari ... Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia. Karena yang pertama tadi sudah kami sebutkan bahwa Permohonan Pemohon ini berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 yang sebenarnya domainnya bukan di Mahkamah.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Kami ingin sampaikan bahwa dalam Petitem Permohonan Pemohon sebagaimana yang sudah disampaikan dalam perbaikan Permohonan.

Pada poin 3 di Petitemnya, Pemohon meminta untuk memerintahkan kepada KPU Pasang ... Kabupaten Pasangkayu untuk menerbitkan keputusan penetapan tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kaba ... Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025.

Nah, menurut kami, Yang Mulia, tidak ada istilah atau frasa dalam setiap Pemilukada maupun Pemilu dengan menggunakan istilah 'pemilihan ulang'. Jadi menurut kami, permintaan atau da ... Permohonan Pemohon itu kabur, Yang Mulia. Yang ada ma ... yang ada hanya pemungutan suara ulang, ataupun penghitungan suara ulang.

Kemudian Yang Mulia, dalam Eksepsi, kami mengenai Eksepsi (...)

1191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:35]

Kalau pemilihan ulang itu kan dimulai dari pros ... seluruh rangkaian prosesnya (...)

1192. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:43:40]

Ya, Yang Mulia.

1193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:40]

Ada juga, kan?

1194. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:43:40]

Ya. Karena be ... ber ... berkaitan dengan Petitem ini, Yang Mulia.

1195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:45]

Ya.

1196. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:43:46]

Siap.

1197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Terus?

1198. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:43:47]

Kemudian kami sampaikan, Yang Mulia, dalam poinnya bahwa karena dalam Permohonan Pemohon sama sekali juga tidak menyebutkan tentang halaman, Yang Mulia. Tidak ada halaman, sehingga kami ke depan ... selanjutnya, mungkin akan menyampaikan Permohonan atau jawaban kami, itu dalam ... sesuai dengan nomor lembaran.

1199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:12]

Oke.

1200. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:12]

Nomor lembaran daripada Pemohon.

1201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:14]

Jadi, Pemohon hanya (...)

1202. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:15]

Nah mungkin (...)

1203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:16]

Pemohon tidak kasih halaman, ya?

1204. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:17]

Ya, kelihatan mungkin (...)

1205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:18]

Nah, itu.

1206. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:18]

Pemohon tidak serius, Yang Mulia (...)

1207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:20]

Ya, ya.

1208. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:20]

Dalam menyusun Permohonannya.

1209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:21]

Biar Termohon bingung, kok itu.

1210. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:22]

Ya, membuat kami bingung, membuat, Yang Mulia, juga mungkin bingung. Mohon izin, Yang Mulia.

1211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:26]

Enggak, kalau saya enggak pernah bingung.

1212. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:30]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya, itu tadi mengenai Eksepsi kami, Yang Mulia. Ada 5 poin pokok daripada Eksepsi kami.
Kemudian, selanjutnya kami masuk pada (...)

1213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:42]

Sebelum pokok Permohonan (...)

1214. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:43]

Siap.

1215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:43]

Saya tanya, tadi waktu mengEksepsi Kedudukan Hukum (...)

1216. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:47]

Ya, Yang Mulia.

1217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:49]

Saudara memisahkan antara lembaga dan orang yang mewakili lembaga, ya, berarti?

1218. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:53]

Siap, Yang Mulia.

1219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:54]

Untuk lembaganya, memang terakreditasi?

1220. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:44:58]

Terakreditasi, Yang Mulia.

1221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:59]

Tapi yang mewakili ini tidak berhak untuk mewakili (...)

1222. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:45:02]

Tidak berwakil ... benar, Yang Mulia. Karena (...)

1223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:04]

Oleh karena itu, tidak punya Legal Standing, ya?

1224. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:45:05]

Tidak punya Legal Standing, Yang Mulia.

1225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:07]

Oke. Baik, silakan, diteruskan.

1226. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:45:09]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, kami masuk dalam pokok Permohonan. Pada intinya, kami menolak seluruh dalil-dalil Permohonan, kecuali yang kami akui dalam Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

1227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:20]

Ya.

1228. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:45:21]

Yang pertama, Yang Mulia. Dalam pokok Permohonan, pada pokok Permohonan lembar ... lembar ke-7. Mohon izin, Yang Mulia, karena enggak ada halaman, kami sebutnya lembar.

Poin 3. Permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 758 dengan modus kecurangan. Terhadap dalil ini, kami menganggap bahwa dalil ini tidak memiliki dasar hukum karena tidak disertai dengan fakta-fakta yang kemudian diuraikan dalam Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Sehingga, Jawaban kami pada dalil ini adalah bahwa Termohon sudah melaksanakan semua (...)

1229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:59]

Tahapan.

1230. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:45:59]

Tahapan, dimulai dari tahapan pencalonan, penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, pelaksanaan kampanye, sampai pada bimbingan teknis pemungutan suara dengan baik, dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yang Mulia.

1231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:11]

Ya.

1232. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:46:11]

Kemudian selanjutnya, Termohon sebagai KPU, Pemohon menganggap bahwa tidak mengumumkan kepada semua pihak yang berhak untuk hadir dalam pleno. Bahwa dalil ini juga kami bantah, Yang Mulia. Kami sudah mengundang semua pihak, yang kemudian harus hadir dalam pleno terbuka. Buktinya juga sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

Kemudian, dalil Pemohon pada lembar ke-8 dan 9, poin 4, yang menyatakan Termohon tindakan keberpihakan kepada calon karena ditemukan 27 PPS atau desa, dis ... tersebar di 10 kecamatan, menggunakan dress code peci hitam dan jilbab merah maroon. Terhadap dalil ini tentu kami tolak, Yang Mulia. Karena menurut Pemo ... Termohon adalah warna merah maroon sepenuhnya merupakan warna dasar dari Termohon, Yang Mulia. Karena hal ini juga sese ... sudah sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 243/PP dan seterusnya dan Nomor 994/HM dan seterusnya.

Bahwa selain itu, warna itu juga tidak berkaitan secara langsung dan tidak boleh dikaitkan dengan indikasi keberpihakan, Yang Mulia.

1233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:25]

Ya.

1234. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:46:26]

Sehingga, menurut kami, Permohonan tersebut harus ditolak, Yang Mulia.

1235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:29]

Ya, itu dalil utamanya itu.

1236. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:46:30]

Ya, Yang Mulia.

1237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:31]

Secara Petikum saja, yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.

1238. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:46:35]

Siap, Yang Mulia. Di Jawaban kami, di dalil-dalil selanjutnya juga, Yang Mulia, kami bacakan yang ter ... apa namanya ... sebagian juga mungkin ada ke Bawaslu, Yang Mulia. Jadi (...)

1239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:50]

Ya, nanti Bawaslu (...)

1240. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:46:51]

Sehingga, kami mohon kepada Bawaslu untuk dapat menjawab. Kami langsung masuk saja ke dalil soal Petikum, Yang Mulia.

1241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:59]

Ya,

1242. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:46:59]

Mohon izin, yang lain kami anggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh dalil yang telah diajukan Termohon di atas, mohon kepada Majelis Hakim ... Majelis Kons ... Hakim Konstitusi sepatutnya menerima Jawaban Termohon dan menolak Permohonan Pemohon karena tidak sesuai dan tidak diikuti dengan bukti-bukti yang memadai.

Olehnya itu, izinkan kami membacakan Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.12 WITA. Dan.
3. Menetapkan perolehan suara tahap ai ... tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang benar sebagai berikut.
Yang pertama, Nomor Urut 1, kolom kosong, perolehan suara 34.657 suara.
Yang kedua, H. Yaumil Ambo Jiwa dan Hj. Herny, perolehan suara 41.819 suara.
Sehingga total suara sah adalah 76.476 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Irfan Idham beserta kawan-kawan dari Kantor Titah Hukum ... Titah Law Firm ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

1243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:54]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

1244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:49:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

1245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:03]

Walaikumsalam.

1246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50:04]

Untuk dan atas nama Pihak Terkait Perkara 72, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu. Sebelum masuk membacakan poin-poin bantahan kami, Yang Mulia, Keterangan kami. Kami mau renvoi persoalan tanggal. Jadi di Keterangan kami, kami menyebut tanggal 21, kemarin di pada saat kami ajukan. Di bagian pendaftaran meminta kami untuk menge... menyampaikan ini di Mahkamah, bahwa itu tanggal 20.

1247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:35]

Oke.

1248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50:36]

Ya. Kami lanjut, Yang Mulia.

1249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:38]

Ya.

1250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50:40]

Saya akan membacakan poin-poinnya saja. Ada 4 Eksepsi, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh (...)

1251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:46]

Ya.

1252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50:46]

Termohon.

1253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:47]

Sama, ya.

1254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50:48]

Tapi, kami mau men-stresing juga di persoalan Legal Standing. Karena ini penting bagi kami untuk sampaikan.

1255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:53]

Ya, silakan.

1256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50:54]

Ya. Bahwa pe ... Permohonan Pemohon dalam Permohonannya. Menyatakan, bahwa Putrawan Suryatno dan Aprisal masing-masing sebagai Koordinator dan Sekretaris Lembaga Pemantau Gerak Langka Indonesia.

Dalam Permohonannya di bagian Kedudukan Hukum, tak satu dalil pun atau bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa kedua person ini adalah orang yang berhak untuk mewakili Lembaga Pemantau Gerak Langka Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.

Dari pantauan kami, bahwa Lembaga Pemantau Gerak Langka Indonesia adalah yayasan yang ada di ... Jawa Barat. Sehingga selayaknya ... kalau Putrawan Suryatno dan Aprisal maju sebagai Pemohon di ... di Mahkamah ini adalah selayaknya mendapat surat kuasa atau semacamnya. Sehingga mempunyai Legal Standing di dalam Permohonan ini.

Kemudian, yang lain-lain sama obscur libel juga. Terus kemudian kami ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:01]

Ya.

1258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:52:02]

Satu itu ada beberapa hal, ada sekitar 4.

Pertama, mengenai tuduhan bahwa KPU Pasangkayu memihak kepada Pihak Terkait (...)

1259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:14]

Itu, sudah (...)

1260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:52:14]

Terkait dengan dress code (...)

1261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:14]

Itu sudah dijawab oleh (...)

1262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:52:17]

Ya.

1263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]

Termohon. Dua-duanya oleh Termohon.

1264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:52:17]

Kami sampaikan bahwa masyarakat Pasangkayu tahu bahwa tagline itu adalah memang milik KPU, jadi tidak ... tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

1265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:27]

Ya.

1266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:52:28]

Kemudian, kedua. Mengenai keterlibatan Bawaslu yang sebagai juru selamat, kami juga bantah. Kami yakini bahwa Bawaslu dalam melaksanakan tugas, tentu sudah ada dengan standar operasional prosedur yang mereka patuhi. Sehingga jangan kemudian ketika perkara tidak di ... diproses, kemudian dianggap sebagai keberpihakan.

1267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:48]

Ya.

1268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:52:50]

Terus, kemudian terkait pembagian BLT yang dilakukan oleh 2 kepala desa pada saat minggu tenang, kami yakini tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak ada satupun instruksi dari Pihak Terkait untuk memerintahkan kedua kepala desa tersebut. Setelah kami konfirmasi, ternyata bahwa BLT itu memang cair tepat pada saat sebe ... me ... menjelang minggu tenang. Sehingga oleh kepala desa yang tidak tahu bahwa ada edaran mengenai tidak boleh membagi itu, dia ketakutan, ketika itu tidak dibagi karena dia merasa bahwa kalau tidak dibagi, sementara ini sudah cair, nanti akan dianggap sebagai temuan, sehingga kemudian dia membaginya. Sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

Nah kemudian, mengenai chatting PNS di grup kepala desa, kami yakini bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan itu dan Pihak Terkait tidak ada di dalam grup tersebut.

1269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:50]

Ya.

1270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:53:51]

Saya pikir, itu poin-poin yang kami sampaikan, Yang Mulia (...)

1271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:54]

Ya, terima kasih (...)

1272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MISBAHUDDIN GASMA [01:53:54]

Dan selebihnya, mohon untuk dianggap dibacakan.

Kami sampai kepada Petitem, saya berbagi dengan teman saya untuk membacakan, itu.

1273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:01]

Ya, silakan.

1274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MURSIK [01:54:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya melanjutkan membacakan Petitum dari rekan saya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagai (...)

1275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:16]

Ini Petitum dari Pihak Terkait atau Petitum dari rekan saya?

1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MURSIK [01:54:18]

Pihak Terkait, Yang Mulia. Mohon izin.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam ekspe ... Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.00 waktu setempat.

Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami, demikian, Yang Mulia. Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait dari kantor GASMA & Co Advocates. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

1277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:24]

Baik, terima kasih.

Terakhir untuk Perkara 72 Bawaslu, sila .. saya persilakan. Ada resumennya?

1278. BAWASLU: HARLYWOOD SULLY JUNIOR [01:55:34]

Ada, Yang Mulia.

1279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:35]

Pendek, ya? Silakan.

1280. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:55:38]

Agak banyak ini, Yang Mulia.

1281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:44]

Ya, kalau gitu ... di anu ... saja, saya pandu saja, supaya cepat.

1282. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:55:49]

Siap, Yang Mulia.

1283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:50]

Ada laporan?

1284. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:55:53]

Laporan 25, Yang Mulia.

1285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:54]

25 laporan. Berapa yang memenuhi persyaratan, menjadi untuk ditindak lanjuti?

1286. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:00]

Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan, laporan itu ada 12, temuan ada 2, kemudian informasi awal ada 11.

1287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:11]

Oke.

1288. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:12]

Dari keseluruhan ini, semua ditangani.

1289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:15]

Ya.

1290. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:17]

Kalau untuk dugaan tindak pidana, untuk laporan, ini ada 5.

1291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:21]

Ya.

1292. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:22]

Kemudian, lanjut ini sampai di putusan, ada 2.

1293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:29]

Putusannya berupa apa?

1294. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:29]

Tetapi yang berkaitan ... yang berkaitan dengan Pilkada Bupati hanya 1, Yang Mulia.

1295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:35]

Oke, he eh. Apa itu?

1296. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:36]

Karena yang ... yang satu gubernur.

1297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:38]

Oke.

1298. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:39]

Yaitu penyalahgunaan fasilitas negara oleh camat.

1299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:43]

Oh, camat menggunakan fasilitas negara?

1300. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:46]

Benar, Yang Mulia.

1301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:47]

Terus, apa anunya ... ditindaklanjuti apa?

1302. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:56:54]

Putusan pengadilan tinggi, 1 bulan pidana, Yang Mulia.

1303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:59]

Camatnya?

1304. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:00]

Camatnya.

1305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:01]

Oke, ini berkaitan dengan pemilihan yang me (...)

1306. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:03]

Bupati.

1307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:04]

Menguntungkan bupati?

1308. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:05]

Bupati, Yang Mulia.

1309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:06]

Oke. Terus, ada lagi?

1310. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:09]

Kemudian, dari ... ada laporan di provinsi sebanyak 2, ini juga berkaitan dengan Pilkada Bupati.

1311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:18]

Ya.

1312. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:19]

Yaitu yang dilaporkan pas ... Calon atas nama H. Yaumil Ambo Djiwa dengan tim (...)

1313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:29]

Ya.

1314. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:30]

Atas nama Agus Ambo Djiwa, termasuk camat yang dilaporkan. Camat ini, Yang Mulia (...)

1315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:36]

Ya.

1316. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:37]

Sudah terlapor di Bawaslu kabupaten, kemudian (...)

1317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:40]

Dilaporkan lagi di provinsi?

1318. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:40]

Dilaporkan lagi di provinsi. Sehingga, penanganannya tidak dilanjutkan untuk laporan di provinsi.

1319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:46]

Oke.

1320. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:57:48]

Kemudian, dari laporan ini, Yang Mulia, untuk calon yang dilimpahkan ke kabupaten, kami tindak lanjuti melalui mekanisme di Gakkumdu.

1321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:01]

Ya.

1322. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:58:02]

Dan kesimpulan di Gakkumdu, di (ucapan tidak terdengar jelas) kedua tidak dilanjutkan.

1323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:08]

Oke. Kenapa tidak dilanjutkan?

1324. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:58:12]

Tidak memenuhi 2 alat bukti, Yang Mulia.

1325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:14]

Oke. Ya, terus, yang lain?

1326. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:58:20]

Berkaitan dengan Bawaslu sebagai juru selamat.

1327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:26]

Ya.

1328. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:58:28]

Ini juga berkaitan dengan sebenarnya gambaran dari 25 temuan laporan dan informasi awal yang kami terima, itu terproses sesuai dengan Perbawaslu 9, Yang Mulia, Tahun 2024.

1329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:49]

Ya.

1330. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:58:52]

Itu saja, Yang Mulia.

1331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:54]

Ya, ada ... ada lagi tambahan yang mau disampaikan?

1332. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:58:57]

Untuk pelaksanaan rekap, Yang Mulia. Pelaksanaan rekapi ...
rekapitulasi dan penetapan hasil.

1333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:06]

Ya.

1334. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:59:07]

Ini sama sekali (...)

1335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:10]

Tidak ada keberatan?

1336. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:59:11]

Tidak ada keberatan dari saksi. Dan saya sempat bertanya, Yang
Mulia, kenapa saksi tidak pernah keberatan (...)

1337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:17]

Ya.

1338. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:59:18]

Di forum rekap itu?
Ya, terima kasih, Yang Mulia.

1339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:21]

Oke. Jadi, tidak ada keberatan, baik di tingkat ... rekap di tingkat
kecamatan maupun tingkat (...)

1340. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:59:27]

Kabupaten.

1341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:27]

Kabupaten.

1342. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:59:28]

Ya.

1343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:28]

Baik. Terima kasih.
Prof. Enny, silakan.

1344. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:59:36]

Baik, terima kasih.
Ke Bawaslu, ya. Ini terkait dengan laporan yang ditujukan kepada calon tunggal mengenai pelantikan pejabat fungsional, itu diselesaikan dengan cara bagaimana? Ada laporan soal itu dari kelima laporan tadi?

1345. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [01:59:54]

Izin, Yang Mulia. Untuk pejabat ... pelantikan pejabat ini bukan laporan, Yang Mulia, tapi ini informasi awal. Kemudian (...)

1346. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:03]

Informasi awal.

1347. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:00:04]

Informasi awal ini, kami lakukan penelusuran. Dan sebenarnya bukan pengisian jabatan, tetapi kenaikan jenjang jabatan, misalnya (...)

1348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:17]

Tidak termasuk yang berkaitan dengan Pasal 71?

1349. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:00:20]

Tidak termasuk di Pasal 71 ayat (1), Yang Mulia.

1350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:23]

Tidak termasuk di situ?

1351. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:00:24]

Benar, Yang Mulia.

1352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:25]

Oh, kalau gitu (...)

1353. BAWASLU: HARLYWOOD SULLY JUNIOR [02:00:26]

Kemudian ada laporan (...)

1354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:27]

Sebentar, sebentar, ke KPU sebentar, Termohon.
Itu betul enggak dalilnya, yang terkait dengan ... terkait dengan adanya pelantikan atau mutasi di situ, ada enggak?

1355. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:00:36]

Sama sekali tidak diuraikan, Yang Mulia, dalam Permohonan (...)

1356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:39]

Tidak ada?

1357. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:00:39]

Seperti apa pelanggaran Pasal 71, yang dimaksud. Karena dikutip semua pasalnya, Yang Mulia, mulai dari Pasal 2, 3, 4.

1358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:47]

Tapi pada ... secara faktual, ada tidak proses mutasi di sana?

1359. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:00:51]

Sampai saat ini, sepengetahuan Termohon, tidak ada, Yang Mulia. Tidak pernah disampaikan juga kepada Termohon, dari Bawaslu juga tidak ada semacam temuan, laporan, ataupun sengketa, Yang Mulia. Terima kasih.

1360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:02]

Tidak ada soal itu, yang menyangkut Pasal 71?

1361. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:01:05]

Tidak ada, Yang Mulia.

1362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:06]

Jadi begitu, ya? Bawaslu?

1363. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:01:07]

Benar, benar, Yang Mulia. Jadi, berkaitan dengan pelantikan ini juga, Yang Mulia. Kami perlu sampaikan di sidang ini, kami ingin menyampaikan antara hasil penelusuran dengan Permohonan Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon bahwa jumlah yang disampaikan oleh Pemohon, itu berkaitan dengan yang pengangkatan jabatan adalah 151. Mohon izin, Yang Mulia. Yang hasil (...)

1364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:46]

Itu pengangkatan jabatan sesuai dengan janji, bukan mutasi yang dimaksud, ya?

1365. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:01:49]

Jenjang ... jenjang fungsional, Yang Mulia.

1366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:51]

Jabatan fungsionalnya?

1367. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:01:52]

Ya, benar.

1368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:54]

Ya.

1369. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:01:54]

Itu dari hasil penelusuran Bawaslu, kami urai, Yang Mulia. Kalau dari hasil penelusuran Bawaslu itu, dari Dinas Pendidikan=108. Untuk versi Pemohon=110, ini ada selisih.

Kemudian, dari Dinas Kesehatan=4 orang, versi Pemohon=35, selisih 1 orang.

Dinas Pertanian=5 orang, sama antara versi Pemohon.
Kemudian, Inspektorat=1 orang, sama dengan versi Pemohon.
Sehingga, ada selisih 3 orang antara hasil penelusuran Bawaslu dengan versi pemo ... eh, yang disampaikan oleh Pemohon.

1370. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:02:40]

Oke.

1371. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:02:40]

Demikian, Yang Mulia.

1372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:02:42]

Ke Temohon lagi. Ini kan calon tunggal, ada enggak, pada waktu proses di awal itu, sosialisasi berkaitan dengan pasangan calon? Supaya tidak jadi calon tunggal itu? Ada tidak pada waktu itu?

1373. TERMOHON: SYAHRUDIN [02:02:58]

Kalau terkait dengan itu, yang ... yang intinya. Izin, Yang Mulia.

1374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:03]

Ya.

1375. TERMOHON: SYAHRUDIN [02:03:03]

Kami sudah lakukan pada saat masa pendaftaran, itu kami sudah lakukan Rakor, memanggil semua partai politik terkait dengan syarat untuk pencalonan.

1376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:16]

Oke.

1377. TERMOHON: SYAHRUDIN [02:03:16]

Sampai dengan batas akhir. Bahkan sempat perpanjangan karena pada saat itu ada apa ... surat dari KPU RI bahwa bisa diperpanjang ketika cuma pada saat itu 1 pasangan calon yang mendaftar. Sementara masih ada sisa jumlah apa ... partai yang tersisa (...)

1378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:37]

Partai politik (...)

1379. TERMOHON: SYAHRUDIN [02:03:38]

Yang terpenuhi. Ya, siap, Yang Mulia.

1380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:40]

Ini didukung oleh berapa calon pas ... partai politik ini?

1381. TERMOHON: SYAHRUDIN [02:03:42]

8, Yang Mulia.

1382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:44]

8 partai politik, ya.

Oke. Terus, yang BLT yang cair tadi itu menjelang pemungutan suara atau kapan itu? BLT yang tadi, dijelaskan cair tadi?

1383. TERMOHON: SYAHRUDIN [02:03:56]

Kalau yang itu, Yang Mulia, saya kurang paham terkait dengan itu, Yang Mulia.

1384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:00]

Tadi dari anu ... ya, Pihak Terkait, ya?

1385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:04:02]

Pihak Terkait, Yang Mulia.

1386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:02]

Ya, silakan.

1387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:04:02]

Jadi ... jadi itu memang cair 2 hari sebelum pencoblosan dan kepala desa tidak berani menahan (...)

1388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:10]

Ini kepala desa mana, itu? Atau seluruh desa cair di sana?

1389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:04:15]

Eggak-eggak, hanya ... hanya 2 desa, Yang Mulia.

1390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:17]

Hanya 2 desa, desa mana saja?

1391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:04:20]

Desa Lilimori dan ... sebentar.

1392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:46]

Ada buktinya, itu?

1393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:04:48]

Ada. Ada, Yang Mulia. Desa Lilimori dan desa (...)

1394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:53]

Desa Lilimori.

1395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:04:58]

Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba dan Kepala Desa Bajawali, Kecamatan Lariang. Jadi hanya 2 desa, itu.

1396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:04]

Oke. Itu perolehan suaranya yang tertinggi siapa, ya, perolehan terbesar diantara 2 desa, itu?

1397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:05:09]

Satunya Pihak Terkait menang, satunya (...)

1398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:12]

Pihak terkait yang menang, untuk yang Lilimori?

1399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:05:15]

Ya, satunya kotak kosong.

1400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:17]

Kotak kosong yang menang, oke.
Baik, terima kasih.

1401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:21]

Cukup. Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar, cukup, ya?

1402. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:05:27]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia.

1403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:29]

Gimana? Apa lagi?

1404. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:05:30]

Izin mengajukan Renvoi, Yang Mulia, terhadap jawaban Termohon, pada (...)

1405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:34]

Renvoi yang dimana?

1406. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:05:36]

Halaman 5 di Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Di situ, di nomor 2, Yang Mulia. Ini ada renvoi terkait dengan bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2, di situ, Yang Mulia. Cuma angka 1, Yang Mulia. Karena dalam susunan Permohonan kami, kami gabung awalnya, kami pisah.

1407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:00]

Dan 2 nya, enggak ada?

1408. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:06:01]

Ya. Dan 2 nya enggak ada, Yang Mulia. Itu saja.

1409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:03]

Jadi yang angka 1, ya?

1410. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:06:03]

Siap, Yang Mulia.

1411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:05]

Baik.

1412. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:06:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

1413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:06]

Ada lagi? Cukup?

1414. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:06:07]

Sudah. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

1415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:11]

Sebelum menginjak ke perkara (...)

**1416. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:12]**

Izin, Yang Mulia. Interupsi.

1417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:15]

Ya, apa?

**1418. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:19]**

Izin dari Pemohon pemantau pemilihan.

1419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:19]

Apa? Sampaikan.

**1420. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:22]**

Artinya, sebelum masuk dalam ini, saya mau bertanya. Apakah masih bisa melakukan penambahan alat bukti, terkait masalah desain calon tunggal yang terlaksana di Kabupaten Pasangkayu? Izin (...)

1421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:34]

Ya, itu buk ... ini, kalau perkara ini nanti berlanjut ke pembuktian, masih boleh menambahkan bukti.

**1422. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:43]**

Oh, ya. Siap-siap.

1423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

Ya. Tapi kalau yang sekarang, sudah terlambat.

**1424. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:46]**

Ya, Yang Mulia.

1425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:47]

Ya.

**1426. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:47]**

Oke.

1427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:49]

Kal ... Tadi, Ibu Viola tadi, karena apa ... dia sudah ada, tapi tinggal melengkapi.

**1428. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:06:55]**

Ya.

1429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:59]

Ya. Nanti kalau dilanjut, silakan tambah alat bukti. Ya?

**1430. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:07:01]**

Ya, siap. Siap, terima kasih, Yang Mulia.

1431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:07]

Temohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-21. Ya, dinyalakan. Biar masuk direkam.

1432. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:07:15]

Benar, Yang Mulia. Sampai T-21, Yang Mulia.

1433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:18]

Meskipun suaranya enggak bagus, masuk rekaman kan enggak apa-apa, ya.

PT-1 sampai dengan PT-21. Pihak Terkait?

1434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:07:18]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:30]

Baik.

Bawaslu PK-291-01 sampai dengan PK-291-74?

1436. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [02:07:36]

Benar, Yang Mulia.

1437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:40]

Nah, kalau ini suaranya bagus. Kalau tadi jelek, tapi biar masuk rekaman, ya.

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Gimana? Objektif, kan, mendengarkan suara? Karena saya suka music. Jadi, kalau ada suara bagus, saya senang, apalagi sebelah saya ini penyanyi.

Baik. Sekarang Perkara 35. Termohon, saya persilakan.

1438. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:08:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamuallaikum wr. wb.

1439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:23]

Walaikumsalam.

1440. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:08:26]

Kami akan menja ... membacakan Jawaban Termohon Komisi (...)

1441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:29]

Agak keras sedikit.

1442. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:08:31]

Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara.

1443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:33]

Ya.

1444. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:08:34]

Namun sebelumnya, Yang Mulia, kami (...)

1445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:36]

Masih pukul 10.30 kok, masih harus bisa keras, kan?

1446. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:08:40]

Ya.

1447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:41]

Apa energi sarapannya sudah habis?

1448. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:08:43]

Namun sebelumnya, Yang Mulia, untuk ... sebelum mengurai mengenai Eksepsi, kami sampaikan bahwa dalam Permohonan Pemohon ini, itu tidak terlalu berkaitan dengan Termohon, Yang Mulia. Itu lebih banyak terkait mengenai Bawaslu dan Pihak Terkait.

1449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:02]

Kalau begitu, anu saja ... yang berkaitan dengan Termohon apa, ya?

1450. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:09:07]

Siap, Yang Mulia. Tapi sebelumnya itu, Yang Mulia, kami tetap akan mengurai (...)

1451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:12]

Ya.

1452. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:09:13]

Mengenai Eksepsi.

1453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:089:14]

Ya.

1454. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:09:15]

Itu yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

1455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:19]

Ya.

1456. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:09:20]

Bahwa seluruh dalil Pemohon itu tidak ada berkaitan mengenai perselisihan, Yang Mulia (...)

1457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:27]

Ya.

1458. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:09:28]

Melainkan mengenai penyalahgunaan Program Penerima Indonesia Pintar (PIP), Yang Mulia.

1459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:37]

Ya.

1460. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:09:39]

Sehingga bahwa objek sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, tanggal ...

diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 13.00, sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang menjadi dalil dari Pemohon, Yang Mulia.

1461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:04]

Ya, terus? Jadi, tidak ada kewenangan, ya?

1462. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:09]

Siap, Yang Mulia.

1463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:09]

Terus, apa lagi?

1464. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:10]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia (...)

1465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:14]

Kedudukan Hukum.

1466. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:14]

Legal Standing.

1467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:15]

Ya.

1468. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:16]

Bahwa (...)

1469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:22]

Melebihi ambang batas?

1470. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:23]

Ya, Yang Mulia. Suara ... selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait itu 5.755[sic!] suara, Yang Mulia.

1471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:34]

Ya.

1472. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:34]

Atau 4,4 suara, Yang Mulia ... 4,4% suara, Yang Mulia.

1473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:37]

4,4%, ya.

1474. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:40]

Sehingga (...)

1475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:41]

Mestinya hanya berapa di situ, di Kabupaten Toraja Utara?

1476. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:47]

Kalau menurut yang sebenarnya, Yang Mulia, itu (...)

1477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:52]

Berapa persen di situ?

1478. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:53]

1,5, Yang Mulia.

1479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:55]

1,5.

1480. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:10:56]

Atau 1.996, Yang Mulia.

1481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:00]

Ya, jadi ini 4,4%.

1482. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:11:02]

4,4%, Yang Mulia.

1483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:04]

Ya, terus, ada Eksepsi lain?

1484. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:11:08]

Eksepsi lain tentang Permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

1485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:13]

Permohonan kabur.

1486. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:11:14]

Ya, itu yang (...)

1487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:15]

Tapi Pemohonnya tidak kabur, lho, ya?

1488. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:11:18]

Siap, Yang Mulia. Itu yang pertama, Yang Mulia. Kami sampaikan mengenai tentang pembuatan draf atau Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon, itu melampirkan beberapa bukti atau foto dalam dalil Permohonan, Yang Mulia. Sehingga, itu tidak berkesesuaian dengan dengan PMK Nomor 3 (...)

1489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:46]

Oh, tidak sesuai dengan PMK.

1490. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:11:47]

Ya, halaman 42 mengenai contoh draf pembuatan Permohonan, Yang Mulia.

1491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:51]

Oke, terus?

1492. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:11:53]

Yang kedua, mengenai tentang total suara sah, Yang Mulia.

1493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:00]

Ya.

1494. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:12:02]

Pada angka 3 huruf f, halaman 4, Permohonan Pemohon menjelaskan jika perhis ... perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara sebesar 107.990 suara, Yang Mulia.

1495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:18]

Ya.

1496. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:12:18]

Sedangkan dalam Pokok Permohonan angka 4 huruf a, halaman 7, jumlah keseluruhan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja adalah 131.089, Yang Mulia.

1497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:32]

Ya.

1498. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:12:32]

Jadi berbeda dengan apa yang menjadi ... dalam dalil (...)

1499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:38]

Ya.

1500. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:12:39]

Pemohon, Yang Mulia.

1501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:40]

Ya, terus.

1502. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:12:41]

Nah, sedangkan ... dalam penetapan yang benar itu, Yang Mulia, jumlahnya itu 131.069, Yang Mulia.

1503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:55]

Ya.

1504. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:12:56]

Jadi keduanya yang diuraikan oleh Pemohon.

1505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:59]

Tidak berkesesuaian?

1506. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:00]

Tidak berkesesuaian, Yang Mulia.

1507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:01]

Oke, terus sekarang pokok (...)

1508. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:05]

Pokok perkara, Yang Mulia.

1509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:06]

Ya.

1510. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:06]

Nah, dalam pokok perkara ini, Yang Mulia. Mulai halaman 8 sampai dengan halaman 21, itu sama sekali tidak ada berkaitan dengan Termohon, Yang Mulia.

1511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:17]

Ya.

1512. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:18]

Semuanya berkaitan dengan Pihak Terkait (...)

1513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:20]

Pihak Terkaitnya, ya?

1514. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:22]

Dan kedua, Yang Mulia.

1515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:23]

Baik, jadi berkaitan dengan Panwas (...)

1516. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:27]

Ya.

1517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:28]

Kemudian berkaitan dengan ... anu, ya ... Bansos dan lain sebagainya.

1518. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:33]

Siap, Yang Mulia.

1519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:34]

Intimidasi orang tua siswa.

1520. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:37]

Ya.

1521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:38]

Oke, ini dari Termohon sudah cukup?

1522. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:41]

Petitum (...)

1523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:42]

Petiumnya, sekarang.

1524. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:13:42]

Siap.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Me ... 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Pasangan Yohanis Bassang, S.E. ,M.Si., dan Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum. Jumlah suara 62.647 suara.
 - 2) Pasangan Calon Frederik V. Palimbong, S.T., M.Ak., dan Andrew Branch Silambi, S.Ak. Dengan jumlah suara 68.422 suara.

Dengan total suara sah adalah 131.069 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedalil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Tim Kuasa Hukum yang hadir Arman dari VDS Law Firm, beserta yang masuk juga dalam Kuasa ini, Yang Mulia. Dari JPN-nya.

1525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:19]

Baik. Terima kasih.

1526. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:15:20]

Siap.

1527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:21]

Sekarang, Pihak Terkait perkara 35.

**1528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:15:25]**

Siap, Yang Mulia.

1529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:27]

Silakan.

**1530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:15:28]**

Izinkan kami menggunakan teknologi yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

1531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:33]

Oke.

**1532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:15:34]**

Kami menyediakan slide.

1533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:35]

Ya, Ini yang ongkosnya lebih mahal ini.

**1534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:15:37]**

Amin, Yang Mulia. Terima kasih.

1535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:38]

Karena pakai PowerPoint segala.

**1536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:12:41]**

Ya.

1537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:42]

Ya.

**1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:15:43]**

Yang Terhormat Mahkamah, kami menyederhanakan tanggapan atau keterangan Pihak Terkait, kami menjadi 3 bagian. Mungkin kalau sudah bisa di tampilkan (...)

1539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:56]

Mana? PowerPoint-nya ditayangkan.

**1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:15:57]**

Ini cukup penting, Yang Mulia, karena seperti yang disampaikan oleh Termohon (...)

1541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:02]

Termohon, tadi, ya.

**1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:16:04]**

Bahwa memang kami yang sering dibahas ini, Yang Mulia. (...)

1543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:06]

Ya.

**1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:16:08]**

Oke.

1545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:09]

Ya, silakan.

**1546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:16:09]**

Lanjut ke slide selanjutnya. Hanya tiga bagian ini, lanjut

1547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:14]

Ya.

**1548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:16:16]**

Ke Eksepsi saja.

Ya, Eksepsi kami yang pertama, Yang Mulia, bahwa kedudukan Pemohon ini memang, sori ... kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kami soroti betul, karena tidak memiliki kewenangan sebenarnya, Yang Mulia, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf B, PMK Nomor 3, dan juga Pasal 135 ayat (2), Undang-Undang 10/2016, bahwa memang ini yang dibahas adalah pelanggaran proses Pilkada, bukan penetapan hasilnya, Yang Mulia.

1549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:55]

Ya, terus?

**1550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:16:57]**

Maka kami menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.

1551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:01]

Oke.

**1552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:17:01]**

Yang selanjutnya, kami akan membahas sedikit di sini. Kedudukan Hukum Pemohon juga tidak berdasar, Yang Mulia. Mereka sangat gampang menyatakan di sidang sebelumnya, mengesampingkan tentang ambang batas ini. Padahal di doktrin redressability ini, kita jelas kan ... ambang batasnya 1,5%, mereka ... hasilnya itu selisihnya 4,4%, jadi cukup jauh.

1553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:27]

Ya.

**1554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:17:27]**

Dan selanjutnya, kami sebenarnya, Yang Mulia, menyediakan ahli untuk ini, cuma ternyata ahli baru di ... boleh di sidang pembuktian, dan kami mohon mungkin nanti tidak perlu kami ajukan.

1555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:39]

Tapi anu ... bisa saja sebetulnya ada ... apa namanya ... keterangan yang sudah dimasukkan, boleh. Kemarin ada beberapa begitu.

**1556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:17:47]**

Oh.

1557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:48]

Tapi ini cukup. Kalau enggak jadi, enggak apa-apa.

**1558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:17:51]**

Kebetulan kami bawa Permohonannya sekarang, Yang Mulia, kalau berkenan (...)

1559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:53]

Ya, apa itu yang di ... anu?

**1560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:17:55]**

Dia akan menjelaskan tentang doktrin redressability ini, ahli (...)

1561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:58]

Enggak, apa pendapatnya dimasukkan di sini saja.

**1562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:18:01]**

Baik. Bahwa doktrin ini memperhitungkan selisih presentasi suara terhadap beban pembuktian termo ... Pemohon. Nah, di sini Pemohon tidak membuktikan sama sekali, Yang Mulia. Dia hanya pakai bukti-bukti yang mengada-ada, padahal Pemohon ini Bupati Incumbent. Dia bilang kami yang TSM, tapi dia yang Bupati Incumbent. Jadi kami rasa ini yang sangat-sangat imajinatif mungkin, Yang Mulia.

1563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:26]

Oke, asumtif gitu, ya.

**1564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:18:27]**

Asumtif juga, Yang Mulia.

1565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:28]

Terus?

**1566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:18:30]**

Terakhir (...)

1567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:30]

Tadi ini doktrin namanya, doktrin apa?

**1568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:18:32]**

Redressability, Yang Mulia.

1569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:34]

Oke, terus?

**1570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:18:36]**

Terakhir, di Eksepsi kami. Kami pasti akan menyinggung tentang obscure libel.

1571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:41]

Ya. Lanjut!

**1572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:18:43]**

Atau Permohon kabur atau tidak jelas.

Yang pertama, ini unik, Yang Mulia. Pemohon ini mengajukan semua laporan ke Bawaslu itu kedaluwarsa. Dari 12 laporan ke Bawaslu, 12-nya itu kedaluwarsa. Bahkan konyolnya, izin, Yang Mulia, 9 dari 12 itu diajukan pada saat mereka mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 5 dan 6, mungkin agak kurang siap mungkin atau gimana tim hukumnya, lain kali bisa kontak kami. Terakhir (...)

1573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:16]

Mau, ya? Pemohon mau diajari, ya?

**1574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:19:19]**

Ya, Yang Mulia. Lain kali, Yang Mulia. Tarifnya bisa bersahabat.

1575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:23]

Oh, uh, tarifnya bisa bersahabat.

**1576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:19:27]**

Terus yang selanjutnya, memang mungkin lebih banyak di Pokok Perkara, Yang Mulia.

1577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:32]

Ya.

**1578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:19:32]**

Nanti akan dijelaskan oleh rekan kami yang memang ada di lapangan.

1579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:35]

Oke, silakan.

**1580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:19:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:49]

Silakan.

1582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:19:50]

Mengenai pokok perkara.

1583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:55]

Lanjut, PowerPoint-nya.

1584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:20:00]

Ya. Mengenai persandingan suara Pemohon dengan KPU. Bahwa ada perbedaan dalam permohonan Pemohon, total jumlah suara yang disebutkan itu berbeda dengan yang semestinya, Yang Mulia.

1585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:14]

He eh, oke.

1586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:20:15]

Terus kemudian yang berikut, di slide berikut. Tanggapan atas tuduhan pelanggaran administrasi penyalahgunaan PIP oleh Tim Pemenangan Frederick Andrew, tidak berdasar. Karena kami beralasan bahwa seperti, Yang ... Yang Mulia, tadi katakan sangat imajinasi ... imajinatif sekali perhitungan suara Pemohon.

1587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:40]

Menurut itu, begitu, ya?

1588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:20:41]

Ya, Yang Mulia.

1589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:42]

Oke, lanjut.

1590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:20:43]

Terus, kemudian bahwa Pemohon gagal membuktikan dalil pelanggaran yang (...)

1591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:48]

TSM.

1592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:20:48]

TSM.

1593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:49]

Ya, terus.

1594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:20:50]

Bahwa kemudian bahwa tuduhan Pemohon mengenai Surat Komisi 10 DPR RI, tertanggal 11 Oktober 2004 ... 2024, cacat administrasi adalah argumen yang sangat keliru, karena sudah sangat benar ... Undangan ... Surat Undangan Komisi 10 DPR RI, tanggal 11 Oktober 2024 merupakan surat yang resmi.

Terus bahwa tuduhan Pemohon mengenai penyalahgunaan PIP oleh Paslon Nomor Urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar, Yang Mulia. Itu dapat kami buktikan dari keterangan saksi (vide Putusan PT-52, PT-53, PT-54, PT-55, PT-57, PT-58 dan PT-59). Kemudian juga ada keterangan PT Bukti ... Bukti PT-60 dan PT-61.

1595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:49]

Baik.

1596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:21:50]

Terus di dalam dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penyang ... penyalahgunaan PIP di 10 kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, tidak akuntabel dan didasarkan atas unlawful evidence.

1597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:03]

Ya.

1598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:03]

Jadi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat putus asa. Menurut kami, Yang Mulia.

1599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:10]

Dalil yang putus asa.

1600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:11]

Ya, dan pastinya tidak akuntabel. Karena didasarkan argumentasi yang asumtif dan tidak berlandaskan perhitungan yang sangat jelas.

1601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:20]

Ini (...)

1602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:21]

Kemudian (...)

1603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:21]

Tipe Kuasa Hukumnya, menyerang sekali, ini.

1604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:25]

Baik.

1605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:25]

Kalau sepak bola, para striker, ini.

1606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:27]

Kemudian, Yang Mulia, kami dalam permohonan menjelaskan ada dugaan kecurangan oleh Pemohon. Jadi, justru Pemohon yang melakukan kecurangan, Yang Mulia.

1607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:41]

Oke.

1608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:42]

Kami menduganya seperti itu.

1609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:43]

Ini serangan balik, ya. Ini, berarti, ya.

1610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:22:46]

Yang pertama, Yang Mulia, pelanggaran pasangla ... Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, melakukan pengangkatan, penugasan, dan pergeseran dalam jabatan lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.

1611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:57]

Apa Pemohon ... anu ... ya? Putahana[sic!]?

1612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:00]

Petahana, Yang Mulia.

1613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:01]

Oke, terus.

**1614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:02]**

Baik. Tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024, yang melakukan pergantian terhadap 147 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

1615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:14]

Ya.

**1616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:14]**

Dan kemudian, Yang Mulia, izin, dibatalkan SK-nya. Jadi, menerbitkan 7 SK terhadap pergeseran tersebut. Dibatalkan ... kemudian pada tanggal 28 Maret 2024.

1617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:26]

Ya.

**1618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:26]**

Vide Bukti 37, yang kami (...)

1619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:28]

Ya.

**1620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:29]**

Sampaikan, Yang Mulia.

1621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:30]

Terus.

1622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:30]

Kemudian, pelanggaran ... dugaan pelanggaran yang kedua itu, keterlibatan aparat sipil negara, kepala bagian umum, dan protokol, serta kepala kelurahan.

1623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:41]

Ya.

1624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:41]

Jadi, di dalam bukti yang kami masukkan Yang Mulia, di (vide PT-38, PT-40, dan PT-41). Itu ... di PT-38 itu, ada bukti rekaman, Yang Mulia.

1625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:57]

PT-38?

1626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:23:58]

PT 38, itu ada bukti rekaman percakapan kepala ... kepala bagian umum, beserta lurah yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 01.

1627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:09]

Oke.

1628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:24:10]

Dan kemudian, terkait hal tersebut, setahu kami, Bawaslu telah melakukan penerusan ke BKN atas dugaan pelanggaran tersebut, Yang Mulia.

1629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:21]

Ya.

1630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:24:22]

Kemudian, yang ketiga. Keterlibatan kepala sekolah yang mendukung Calon Bupati Nomor Urut 1.

1631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:32]

Oke.

1632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:24:33]

Itu sangat jelas dalam bukti (vide PT-42, PT-44, PT-45, dan PT-50), Yang Mulia. Itu digunakan Group WhatsApp bernama K3S TORUT. Jadi, itu merupakan grup koordinasi kepala-kepala sekolah di Toraja Utara, baik tingkat SD dan SMP. Dimana di situ mereka diarahkan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1.

1633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:03]

Oke.

1634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:25:04]

Terus yang keempat, Yang Mulia. Mobilisasi kepala sekolah tingkat SD, SMP, serta ASN di OPD Kabupaten Toraja Utara. Jadi, dalam Bukti PT-44, PT-45, PT-46, PT-48, dan 49, itu keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Paslon 01, khususnya Bapak Bupati Yohanis Bassang sebagai Bupati Petahana, itu mengumpulkan kepala sekolah dikediamannya yang beralamat di Lampan, Desa Tondon Sibata, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, itu dimulai sejak Januari 2024. Dimana hal tersebut, dilakukan untuk mendukung dan memenangkan istri beserta kedua anaknya, Yang Mulia. Dan itu dilanjutkan untuk mendukung beliau (...)

1635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:58]

Oke.

1636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:25:58]

Dalam Pilkada November (...)

1637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:01]

Ya (...)

1638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:26:01]

2024.

1639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:02]

Sedikit dipercepat.

1640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:26:03]

Cukup, Yang Mulia.
Terus kemudian, lanjut ke Petitum.

1641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:07]

Petitum, silakan.

1642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:26:07]

Dalam Eksepsi.
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2000 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Mangatta Toding Allo dan kawan-kawan (...)

1643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:44]

Baik.

1644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABNER BUNTANG [02:26:44]

Bertanda tangan.

1645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:45]

Baik, terima kasih.
Sekarang Bawaslu Kabupaten Toraja, saya persilakan.

1646. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:26:53]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:58]

Walaikumsalam.

1648. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:26:58]

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.

1649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:01]

Pok ... pokok-pokoknya, ya.

1650. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:27:03]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Bahwa Keterangan yang sudah kami sampaikan, kemudian dalam Perkara 35 yang dimohonkan oleh Pemohon. Kami sampaikan bahwa yang pertama, Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbandingan perolehan hasil penghitungan suara, angka 4, huruf b, halaman 8. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan pe ... Permohonan sengketa pemilihan.

Yang kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Paslon Nomor Urut 2 terlibat penyalahgunaan Bantuan Dana Pendidikan Kartu Program Indonesia Pintar, huruf c, angka 1 dan angka 2, dalam halaman 8 sampai dengan halaman 21. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.

Kami persingkat, Yang Mulia.

1651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:59]

Ya ...

1652. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:28:00]

Bahwa sehubungan dengan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaporkan sejumlah 13 laporan, terdiri dari laporan ke Bawaslu kabupaten=1 laporan, Panwaslu Kecamatan Kesu=3 laporan, Panwaslu Kecamatan Sanggalangi=2 laporan, Panwaslu Kecamatan Sopai=1 laporan, Panwaslu Kecamatan Nanggalala=1 laporan, Panwaslu Kecamatan Rantebua=2 laporan, Panwaslu Kecamatan Balusu=1 laporan, Panwaslu Kecamatan Baruupu=1 laporan, Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo=1 laporan.

Dapat kami jelaskan bahwa keseluruhan laporan sebagaimana yang disebutkan di atas dilaporkan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Toraja Utara yang dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keseluruhan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal laporan dalam hal telah melewati ketentuan batas waktu penyampaian laporan, yakni 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Kemudian, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dapat kami menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menyebutkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi TSM dilakukan terhadap laporan pelanggaran administrasi TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Bawaslu provinsi, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Selatan.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, permohonan tidak menyampaikan laporan pelanggaran administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa laporan pelanggaran administrasi TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Itu artinya bahwa laporan

pelanggaran administrasi TSM sejak penetapan peserta pemilihan, yakni dimulai pada tanggal 22 September pada saat penetapan sampai dengan pungut hitung, yakni pada tanggal 27 November 2024.

1653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:56]

Ya.

1654. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:30:57]

Bahwa laporan-laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar yang menurut Pemohon secara TSM, dapat kami jelaskan bahwa keseluruhan laporan tersebut disampaikan kepada pengawas pemilihan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Toraja Utara (...)

1655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:15]

Sudah, selesai, ya?

1656. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:31:16]

Dilaksanakan.

1657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:16]

Ya.

1658. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:31:18]

Izin, Yang Mulia. Kami tambahkan bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait aktivitas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 21 November yang didalilkan pada halaman 18 sampai 19, pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kelurahan Desa Makuan Pare, Kecamatan Rantebua, dan Panwas Kecamatan Sanggalangi. Dapat kami jelaskan bahwa aktivitas kampanye tersebut bukan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, melainkan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024, yang bertempat di Lembang Makuan Pare, Kecamatan Rantebua, dan Kelurahan Paepalean, Kecamatan Sanggalangi. Demikian, Yang Mulia.

1659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:02]

Ya, yang lain dianggap dibacakan, ya.

1660. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:03]

Siap, Yang Mulia.

1661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:04]

Baik. Ada lagi yang mau, penting yang mau disampaikan? Cukup, ya?

1662. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:09]

Ya. Izin, Yang Mulia, saya tambahkan saja.

1663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:12]

Ya.

1664. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:13]

Bahwa Bawaslu Toraja Utara sejak pelaksanaan Pilkada 2024, laporan dan temuan di Bawaslu Kabupaten Toraja Utara itu, laporan ada 16 laporan.

1665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:23]

Ya.

1666. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:24]

Satu, laporan berkaitan dengan dalil Pemohon.

1667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:26]

Ya.

1668. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:23]

Kemudian, temuan ada tiga, tetapi tidak berkaitan dengan dalil Pemohon.

1669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:30]

Ya.

1670. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:31]

Laporan temuan di tingkat kecamatan atau tingkat Panwaslu kecamatan, laporan ada 12, kese ... kesemuanya itu berkaitan dengan dalil Pemohon.

1671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:42]

Ya.

1672. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:43]

Namun, karena berdasarkan kajian awal tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil. Kemudian temuan nihil.

1673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:50]

Oke, baik.

1674. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:32:51]

Demikian.

1675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:52]

Terima kasih.

Proff. Enny, ada yang mau disampaikan? Silakan.

1676. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:59]

Baik, kepada Termohon, ya.

Ini kan ada 2 Paslon, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Paslon yang petahana ini, dukungan partai politiknya apa saja? Paslon pertama boleh, kalau Paslon kedua juga boleh diceritakan. Dukungan partai politiknya apa saja, yang Paslon pertama?

1677. TERMOHON: JAN HERY PAKAN [02:33:20]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Paslon pertama didukung oleh dua partai, yaitu Partai Golkar dan Partai Perindo. Kemudian, Paslon Nomor 2 didukung oleh delapan partai, Partai Gerindra, Demokrat, PDIP.

1678. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:41]

Oh, ini yang kalah, ya?

1679. TERMOHON: JAN HERY PAKAN [02:33:42]

Ini yang menang.

1680. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:43]

Yang menang? Oh, ya. Yang menang, ya. Yang menang. Yang petahana itu yang Paslon pertama, ya?

1681. TERMOHON: JAN HERY PAKAN [02:33:48]

Ya.

1682. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:49]

Ya, didukung oleh delapan partai politik.

1683. TERMOHON: JAN HERY PAKAN [02:33:50]

Ya.

1684. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:51]

Di luar parpol dan Perindo itu, ya?

1685. TERMOHON: JAN HERY PAKAN [02:33:53]

Ya.

1686. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:54]

Oke. Kemudian, terkait dengan tadi, ini kan isunya yang paling utama kan PIP itu, ya, Program Indonesia Pintar. Itu sebenarnya programnya pemerintah daerah (petahana) atau program individu sebenarnya? Bisa dijelaskan? Kalau tidak salah Pihak Terkait yang ingin menjelaskan, silakan Pihak Terkait.

**1687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:17]**

Izin, terima kasih, Yang Mulia.
Itu program pribadi dari Ibu Eva Rataba yang kebetulan juga ketua tim pemenangannya, Pak (...)

1688. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:28]

Program pribadinya, yang ada suratnya ini, ya?

**1689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:30]**

Ya, Yang Mulia.

1690. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:31]

Suratnya yang berkop Eva Stefany itu?

**1691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:35]**

Betul, Yang Mulia.

1692. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:36]

Itu memang sering dilakukan, program itu?

**1693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:38]**

Itu sudah (...)

1694. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:38]

Di luar ... apa namanya, proses Pilkada ini?

1695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:41]

Pilkada.

**1696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:42]**

Izin, Yang Mulia. Ya, itu sudah terjadwal, malah jauh sebelum ada Pilkada ini, Yang Mulia.

1697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:46]

Memang sering dilakukan?

**1698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:47]**

Sangat sering. Beliau juga (...)

1699. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:48]

Sangat sering dilakukan. Artinya beliau mengumpulkan dan membagikan apa namanya, bantuan untuk Indonesia Pintar?

**1700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:54]**

Betul, Yang Mulia.

1701. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:55]

Programnya itu?

**1702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:34:56]**

Betul, Yang Mulia.

1703. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:57]

Ada bukti enggak, yang menunjukkan bahwa di luar yang sekarang ini juga sering dilakukan?

**1704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:01]**

Ada, Yang Mulia. Sampai ada juga (...)

1705. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:03]

Bukti-buktinya.

**1706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:04]**

Baik.

1707. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:04]

Di luar yang di ... yang didalilkan.

**1708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:07]**

Izin, mohon waktu sebentar, Yang Mulia.

1709. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:09]

Di P ... di P ... anu... P... apa, PT berapa itu?

**1710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:13]**

Di (...)

1711. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:15]

Buktinya?

**1712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:16]**

Di... Sebentar, Yang Mulia.

1713. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:20]

Nah, coba sambil mencari (...)

**1714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:21]**

Ya.

**1715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:21]**

Dari ke ... Termohon.

Kalau yang didalilkan kan di Kecamatan Rantepao, itu berapa perolehan suaranya? Paslon 1, Paslon 2? Perolehan suaranya ada?

**1716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:44]**

Kami sudah bisa, Yang Mulia?

1717. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:45]

Ya, ada? PT berapa?

**1718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:47]**

Ada.

Ada di PT-27, Yang Mulia.

1719. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:54]

27, ya.

**1720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:35:55]**

Itu tentang penghargaan kepada Ibu Eva yang sering memberikan program (...)

1721. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:01]

Ya. Program Indonesia Pintar, maksudnya, di situ?

**1722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:02]**

Ya, Yang Mulia.

1723. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:03]

Itu yang dilakukan di luar ... apa namanya ... penjadwalan Pilkada, ya?

**1724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:07]**

Ya, Yang Mulia. Betul.

1725. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:08]

PT-27, PT berapa lagi?

**1726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:10]**

PT-27, PT-28.

1727. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:13]

28.

**1728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:14]**

PT-29.

1729. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:15]

Ya.

**1730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:16]**

Terus, tentang peraturan ... tentang PIP, juga PT-25, kami sa ...
sampaikan.

1731. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:21]

Punya enggak (...)

**1732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:22]**

PT-26.

1733. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:23]

Buktinya? Perolehan suara di Rantepao, itu berapa?

**1734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:28]**

Ti ... tidak kami sampaikan, tapi Bawas ... dari KPU (...)

1735. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:31]

Ada?

**1736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:36:31]**

Sudah sampaikan, Yang Mulia.

1737. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:32]

KPU. KPU sudah dapat, itu? Termohon? Ada enggak, perolehannya?

1738. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:36:53]

Untuk Kecamatan Rantepao, Yang Mulia.

1739. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:57]

Ya.

1740. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:36:57]

Pasangan Nomor 1 jumlah suara 6.004 suara.

1741. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:03]

6.004 suara (...)

1742. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:37:04]

Suara.

1743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:05]

Paslon 2?

1744. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:37:06]

Paslon 2=8.413 suara, Yang Mulia.

1745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:12]

8.432 suara. Ya?

1746. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:37:14]

13 suara, Yang Mulia.

1747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:15]

13 suara. Itu untuk yang menang, ya?

1748. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:37:18]

Siap, Yang Mulia.

1749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:19]

Kemudian, ini terkait dengan mutasi pejabat, ada 147 pejabat, ya? Tadi yang dimuna ... dimutasikan, itu? Itu ada kaitan dengan Pasal 71, enggak? Dari Bawaslu?

1750. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:37:34]

Izin, Yang Mulia. Sekaitan dengan proses di Bawaslu, sekaitan adanya laporan.

1751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:42]

Oke.

1752. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:37:43]

Laporan (...)

1753. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:44]

Ini ada laporan? Soal ini?

1754. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:37:46]

Ada laporan.

1755. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:47]

Ada laporan.

1756. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:37:48]

Ada laporan. Tetapi, kami fokus pada dalil Pemohon.

1757. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:50]

Oke.

1758. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:37:51]

Namun karena, Yang Mulia, ingin mungkin mendapatkan informasi hasil pengawasan (...)

1759. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:55]

Jadi, sudah jelaskan? 28 Maret itu, dibatalkan?

1760. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:37:59]

Jadi, izin, Yang Mulia. Jadi, pada saat proses mutasi yang dilakukan oleh Bupati Toraja Utara pada tanggal 22 Maret 2024 (...)

1761. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:07]

22 Maret, ya? Ini, ya?

1762. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:08]

Ya, 2024.

1763. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:09]

22 Maret.

1764. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:10]

Bawaslu Toraja Utara melakukan pencegahan ... upaya pencegahan dengan menyampaikan imbauan.

1765. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:17]

Ada imbauan?

1766. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:17]

Setel ... ada imbauan.

Setelah itu, Yang Mulia. Dalam proses selanjutnya, berdasarkan imbauan tersebut, karena ini sudah diproses di Sentra Gakkumdu.

1767. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:26]

Ya.

1768. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:27]

Bawaslu Toraja Utara, bersama dengan pihak pelaksanaan dan kepolisian. Dan (...)

1769. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:31]

Ini ada hasilnya? Dari Sentra Gakkumdu?

1770. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:32]

Ada hasil (...)

1771. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:33]

Ya.

1772. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:33]

Sentra Gakkumdu.

Dan kemudian juga, tidak serta-merta kami mengambil sikap seperti itu, tetapi kami melakukan konsultasi. Konsultasi kami tersebut, kami lakukan bersama dengan Sentra Gakkumdu Toraja Utara (...)

1773. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:47]

Ya.

1774. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:47]

Dengan per ... melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, sekaitan dengan hal tersebut.

1775. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:54]

Kemudian hasilnya gimana?

1776. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:55]

Kemudian Bawaslu RI ... Bawaslu Provinsi.

1777. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:57]

Dibatalkan itu pelantikan?

1778. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:38:59]

Dibatalkan pelantikan tersebut. Setelah itu (...)

1779. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:00]

Setelah dibatalkan, tanggal 28 Maret, itu?

1780. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:02]

Dibatalkan. Setelah itu kemudian, diajukan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dan berdasarkan persetujuan Kemendagri, barulah mereka melakukan (...)

1781. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:11]

Kapan keluarnya persetujuan Kemendagri-nya, itu?

1782. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:15]

Saya kurang mempersiapkan (...)

1783. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:17]

Tahu dari Termohon?

1784. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:17]

Agenda tersebut lagi.

1785. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:19]

Termohon tahu ada persetujuan Kemendagri-nya, itu?

1786. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:39:24]

Tidak. Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia.

1787. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:27]

Tidak tahu. Tapi ada persetujuan, ya, dari Bawaslu?

1788. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:29]

Ada perse (...)

1789. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:31]

Ada persetujuan. Setelah itu, dilantik lagi?

1790. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:33]

Dilantik lagi. Sesuai dengan data-data yang diusulkan dan kemudian, direview oleh Kemendagri.

1791. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:39]

Dalam jumlah yang sama?

1792. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:40]

Sudah berbeda, Yang Mulia.

1793. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:41]

Jumlahnya berbeda?

1794. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:42]

Siap, Yang Mulia.

1795. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:43]

Ya. Ini ada ... ada tambahan bukti di soal ini, enggak, Bawaslu?

1796. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:46]

Kami berfokus pada dalil Pemohon saja, Yang Mulia. Sekaitan dengan PIP (...)

1797. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:51]

PIP.

1798. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:51]

Karena cuman tunggal yang disampaikan (...)

1799. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:52]

Ya.

1800. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:39:52]

Sekaitan dengan PIP.

1801. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:53]

Baik, terima kasih.

1802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:54]

Baik, terima kasih, Prof. Enny. Sudah selesai.

Ini ada yang perlu dikonfirmasi ini. Pihak Terkait belum melampirkan kartu tanda anggota atas nama ... ada dua orang, Mangatta Toding dan Bhirawa. Itu kartu tanda anggotanya, gimana?

**1803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:19]**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

1804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:21]

Kapan?

**1805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:22]**

Sudah kami (...)

1806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:22]

Ini catatannya belum.

**1807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:23]**

Di tanggal 17, kebetulan saya juga hadir, Yang Mulia.

1808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:26]

Oke.

**1809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:27]**

Nanti kalau harus diperlihatkan, kami siap perlihatkan lagi.

1810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:38]

Ditambahkan saja, ya?

**1811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:39]**

Baik, Yang Mulia, kami bawa.

1812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:40]

Karena ini yang ada cuma ini. Alderianto dan satunya Buntang, supaya administrasinya semuanya beres. Abner Buntang dan Alderianto (...)

**1813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:58]**

Siap.

1814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:58]

Yang lain belum.

**1815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:40:59]**

Kebetulan saya bawa salinan tambahan, Yang Mulia.

1816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:01]

Nah, nanti ditambahkan, ya (...)

**1817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:41:02]**

Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:02]

Di bawah, ya.

**1818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO
[02:41:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:06]

Ya, soalnya saya anu ... bagus ini, anak-anak muda yang bagus, sistematis, ya. Jadi, senang saya kalau anu ... jiwa gurunya keluar saya kalau gini ... lihat begini ini, ya.

Kemudian, untuk yang Kuasa Termohon juga belum, Fadel dan Dewi Ambarwati[sic!], ini karena anunya ... KTA-nya kedaluwarsa.

1820. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:41:36]

Itu sudah kami ajukan kembali, Yang Mulia.

1821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:39]

Ya, nanti (...)

1822. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:41:36]

Tapi nanti kami (...)

1823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:41]

Ditambahkan, ya (...)

1824. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:41:41]

Siap, siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

1825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:46]

Ya, kalau enggak, enggak boleh anu itu ... Prinsipal bisa menahan honorariumnya dulu itu, ya.

Baik. Buktinya sekarang, Pemohon menunjukkan Bukti tambahan P-71 dan P-80, ya?

1826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:42:02]

Betul, Yang Mulia.

1827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:02]

Baik. Kemudian, Termohon T-1 sama dengan T-28?

1828. KUASA HUKUM TERMOHON: ARMAN [02:42:07]

Benar, Yang Mulia.

1829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:10]

Kemudian, Pihak Terkait PT-01 sama dengan PT-62?

1830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025: MANGATTA TODING ALLO [02:42:13]

Betul, Yang Mulia.

1831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:14]

Baik. Kemudian yang terakhir, Bawaslu PK-27-21.1 sama dengan PK-27-21.52, betul?

1832. BAWASLU: BRIKKEN LINDE BONTING [02:42:25]

Betul, Yang Mulia.

1833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:26]

Ya, seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ini seluruh rangkaian sidang yang kedua (...)

1834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:42:37]

Izin, Yang Mulia.

1835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:37]

Dari mana?

1836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:42:39]

Dari Kota Palu, Yang Mulia. Permohonan Perkara Nomor 4 ... 145, Yang Mulia.

1837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:46]

Oh, Pemohon. Ya, kenapa?

1838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:42:46]

Ya, Yang Mulia, Pemohon.

Mohon diperkenankan, Yang Mulia, kemarin kita ada masukkan tambahan bukti waktu sidang awal tanggal 13, dan itu sudah diregistrasi. Mohon perkenannya untuk disahkan, Yang Mulia.

1839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:03]

Perkara 35?

1840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:43:04]

145, Yang Mulia.

1841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:05]

Oh, 145?

1842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:43:06]

Ya.

1843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:12]

Sebentar. Baik, ini nanti kita lihat dulu.

1844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:43:15]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

1845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:15]

Ini untuk Perkara 145, 162, 262, 72, dan 35, ini hasil sidang penyampaian Permohonan dan Jawaban yang sekarang dilakukan akan dila ... laporkan kita bertiga ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, yang dihadiri oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hasilnya itu ada dua, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian. Tapi bisa juga kalau dianggap telah cukup oleh Mahkamah, maka perkara tidak dilanjutkan, tapi diputus, sudah selesai. Sehingga, proses rangkaian Pilkadaanya sudah bisa dilantik kalau itu, ya.

Nah, sekarang yang berikutnya, apabila pemeriksaan dilanjutkan, maka sidang selanjutnya adalah sidang pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi, dan ahli, dan pengesahan alat bukti tambahan. Jadi, masih bicara ditambahkan tadi, ya. Nah, itu jumlah saksinya untuk tingkat provinsi=6 orang, saksi atau ahli jumlahnya 6 orang, terserah komposisinya, mau ahlinya banyak atau saksinya banyak, terserah, untuk provinsi 6 orang. Tapi untuk kabupaten/kota jumlahnya maksimal 4 orang.

Ya, oleh karena itu, begini, dalam perkara Pilkada, perkara di Mahkamah, itu bukti formal yang namanya tertulis itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada saksi atau anu ... meskipun disumpah, telah disumpah, ya.

Oleh karena itu, kalau nanti dibaca di PMK, urutan buktinya yang pertama adalah bukti tertulis, makanya silakan menambahkan bukti yang autentik itu tadi, ya.

Kemudian untuk saksi atau ahli dan buktinya nanti, itu daftarnya, identitasnya, keterangan saksinya apa, dan curriculum vitae-nya, itu diserahkan paling lambat satu hari sebelum sidang pembuktian. Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, kapan sidang pembuktian, ya. Tapi juga nanti kalau perkara ini mau ada yang tidak dilanjutkan, nanti sidangnya kapan juga akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Terus kemudian penambahan alat bukti dan inzage sementara sudah berhenti, nanti kalau sidang pembuktian bisa menambahkan lagi, ya. Demikian.

Itu yang dimaksud 145 buktinya, bukti nomor berapa?

1846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:24]

Izin, Yang Mulia, P-52 dan P-66, Yang Mulia, sampai P-66, yang kami masukkan tanggal 13 Januari.

1847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:31]

Ya, sudah disahkan, tadi sudah disahkan, P-1 sampai dengan P-66.

1848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:36]

Ya, Yang Mulia.

1849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:37]

Ya, kan?

1850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:38]

Ya.

1851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:39]

Sudah, tadi sudah disahkan.

1852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:40]

Oh, sudah disahkan, ndak karena tadi yang disahkan saya dengar Pasangkayu, Yang Mulia ... Donggala, Yang Mulia, tadi.

1853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:46]

Oh enggak, ini tadi sudah ini, ini catatannya.

1854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:48]

Oh, siap yang mulia.

1855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:50]

Ya, P-1 sampai dengan P-66 kan?

1856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:52]

Ya, Yang Mulia.

1857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:53]

Itu sudah termasuk ini kan?

1858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:54]

Sudah, Yang Mulia.

1859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:55]

Waduh, kacau balau ini.

1860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:46:57]

Mungkin tadi karena lambat, Yang Mulia, jadi awalnya mungkin sudah di ini ... terima kasih, Yang Mulia.

1861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:01]

Enggak terlambat kok ini tadi kok, kan Anda sudah duduk itu.

1862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IKBAL [02:47:04]

Siap, Yang Mulia.

1863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:06]

Mungkin takut sama sekuriti jadi bingung malah.

Baik, ada yang mau ditanyakan kembali? Pemohon? Cukup, ya. Termohon? Pihak Terkait? Bawaslu? Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan ketertiban persidangan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.11 WIB

Jakarta, 21 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

